

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Gambaran Umum MTs Maslakul Huda Sluke

a. Tinjauan Historis

Madrasah Tsanawiyah Maslakul Huda Sluke Kab Rembang berdiri pada tahun 1998 ,di bawah naungan Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan Sosial Maslakul Huda, saat itu masih berada di lingkungan Masjid Jami`Baiturrohman Sluke dengan surat keputusan kepala bidang pembinaan perguruan agama Islam kantor wilayah Departemen Agama Provinsi Jawa Tengah nomor Wk/5.c/PP.03.2/3736/1998, tanggal 16 September 1998 dan keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Rembang nomor 451.1/3519 tanggal 10 November 1998. Madrasah ini didirikan oleh Sudjati Kepala Desa Sluke, Kyai.Samsul Hadi, Drs.H. Rofiq Musa, S.H, dan Kyai Jufri, atas dorongan masyarakat agar di Kecamatan Sluke terdapat sebuah Madrasah Tsanawiyah . Pada tahun 1998 merupakan tahun rintisan dengan jumlah guru 9 orang, dan Kepala Madrasah pertamanya Sahli, BA. Yang menjabat dari tahun 1998-2003, kemudian dilanjutkan oleh Ahmad Jalil Amajid, S.Pd, dari tahun 2004-2008, dilanjutkan Sumardi, S.Pd, M.Pd, yang menjabat dari tahun 2008- sekarang. Dalam perkembangannya simpati masyarakat di Kec Sluke umumnya sangat kurang, dan jumlah siswa sangat sedikit. Atas inisiatif pengurus yayasan dan dukungan berbagai pihak , maka pada tahun 2009 MTs Maslakul Huda Sluke pindah ke lokasi baru di Dukuh Seketi Desa Sluke RT 6 RW 1, di atas tanah gege seluas 1.762 m² dengan sertifikat tanah wakaf nomor 00006 NIB 11.14.13.10.00298 hak milik nomor 00736, atas kebijaksanaan Kepala Desa Sluke yang saat itu dijabat Sudjati. Perkembangan selanjutnya MTs Maslakul Huda Sluke mampu membel lahan seluas 4.328 m² Dengan sertifikat nomor 00724.

Jadi luas total lahan adalah 6.090 m². Hingga saat ini jumlah guru telah mencapai 28 orang dengan latar belakang magister 1 orang, 27 orang bergelar sarjana dan 4 orang tenaga kependidikan. Jumlah siswa pada tahun pelajaran 2016/2017 sebanyak 475 siswa, terdiri dari 160 siswa kelas VII, 152 siswa kelas VIII, dan 163 siswa kelas IX, sedangkan komposisi APBM sebesar Rp 475.000.000,-.¹

b. Profil MTs Maslakul Huda Sluke

Nama Madrasah	: MTs Maslakul Huda Sluke
No Statistik Madrasah	:121233170021
NPSN	: 20364031
Propinsi	: Jawa Tengah
Kabupaten	: Rembang
Kecamatan	: Sluke
Desa	: Sluke
Kode Pos	: 59260
Kelompok Madrasah	: KKM MTs Kab Rembang
Akreditasi	: A
Tahun Berdiri	: 1998
Bangunan Madrasah	: Gedung Permanen
Jarak Ke Pusat Kec	: 2 Km
Jarak Ke Pusat Kab	:22 Km

c. Struktur Organisasi MTs Maslakul Huda Sluke

Kepala Madrasah	: M. Sumardi, S.Pd, M.Pd
Waka Kurikulum	: Hidayatul A`immah, S.Pd.I
Waka Kesiswaaan	: Kristia Ningsih, S.Ag
Waka Humas	: Abdul Jalil Amajid, S.Pd
Waka Sarpras	: Achmad Yuianto, S.Pd
Kepala Tata Usaha	: Nita Ervinnaimah, S.E
Bendahara	: Nita Ervinnaimah, S.E.

¹ Diolah dari Dokumentasi Grand Design MTs Maslakul Huda Sluke, Tahun Pelajaran 2016/2017.

d. Visi Misi , Motto, dan Tujuan MTs Maslakul Huda Sluke

- 1) Visi : Terwujudnya peserta didik yang religius, Peduli, dan meraih prestasi.

Visi tersebut menceminkan cita-cita madrasah yang berorientasi ke depan dengan memperhatikan potensi kekinian, untuk melahirkan generasi robbani yang berkarakter dan siap menghadapi persaingan global. Indikator pencapaian Visi :

a) Religius

- (1) Menjadikan Nabi Muhammad Saw sebagai suri tauladan
Terbiasa senyum, salam, sapa dan sopan-santun
- (2) Hafal dan fasih bacaan sholat dan keserasian /kesempurnaan gerakan
- (3) Hafal dan fasih doa –doa harian, doa setelah sholat
- (4) Terbiasa membaca Al Waqiah, asmaul husna, sholawat, juz `amma, yasin, tahlil dan istighosah
- (5) Terbiasa menjalankan sholat dhuha
- (6) Terbiasa memberikan infaq dan shodaqoh
- (7) Mampu mengelola dan sekaligus sebagai petugas dalam kegiatan keagamaan di madrasah dan masyarakat

b) Peduli

- (1) Tidak mengganggu teman yang berbeda pendapat
- (2) Menerima kesepakatan meskipun berbeda dengan pendapatnya.
- (3) Dapat menerima kekurangan orang lain
- (4) Dapat memaafkan kesalahan orang lain
- (5) Mampu dan mau bekerja sama dengan siapapun yang memiliki keberagaman latar belakang, pandangan dan keyakinan.
- (6) Tidak memaksakan pendapat atau keyakinan diri pada orang lain

- (7) Bersedia untuk belajar dari (terbuka terhadap) keyakinan dan gagasan orang lain agar dapat memahami orang lain lebih baik.
 - (8) Terbuka terhadap atau kesediaan untuk menerima sesuatu yang baru.
 - (9) Terlibat aktif dalam bekerja bakti membersihkan kelas atau sekolah
 - (10) Kesediaan melakukan tugas sesuai kesepakatan
 - (11) Bersedia membantu orang lain tanpa mengharap imbalan
 - (12) Aktif dalam bekerja kelompok
 - (13) Memusatkan tujuan pada kelompok
 - (14) Tidak mendahulukan kepentingan pribadi
 - (15) Mencari jalan untuk mengatasi perbedaan pendapat/pikiran antara pribadi, dengan orang lain
 - (16) Mendorong orang lain untuk bekerjasama demi mencapai tujuan bersama.
- c) Disiplin
- (1) Datang tepat waktu
 - (2) Patuh pada tata tertib atau aturan bersama /madrasah
 - (3) Mengerjakan/mengumpulkan tugas sesuai dengan waktu yang ditentukan, mengikuti kaidah berbahasa tulis yang baik dan benar
 - (4) Berseragam sesuai peraturan madrasah
 - (5) Melaksanakan piket sesuai dengan jadwal.
- d) Meraih Prestasi
- (1) Unggul dalam perolehan nilai ujian
 - (2) Unggul dalam persaingan untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan berikutnya.
 - (3) Unggul dalam olimpiade sains dan kompetensi sains madrasah
 - (4) Unggul dalam lomba kreatifitas , seni, olahraga, dan IPTEK

(5) Unggul dalam lomba pidato 4 Bahasa, Inggris, Arab, Indonesia dan Jawa

(6) Unggul dalam kepemimpinan.

2) Misi :

- a) Mewujudkan sikap religius dan berakhlakul karimah dalam kehidupan sehari-hari.
- b) Mewujudkan sikap peduli lingkungan dan mempererat ukhuwah islamiyah.
- c) Menciptakan pembelajaran yang aktif , inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan.
- d) Mewujudkan generasi yang berprestasi, memiliki kecerdasan dan keterampilan yang berlandaskan IMTAQ dan IPTEK.
- f) Mewujudkan perkembangan madrasah bersama peserta didik dan stakeholder sesuai perkembangan zaman.²

3) Motto Madrasah

Motto madrasah adalah membimbing akhlaq meraih prestasi.

4) Tujuan Madrasah

Tujuan adalah langkah-langkah untuk mewujudkan visi dan misi madrasah. Tujuan dirumuskan untuk jangka waktu empat tahun ke depan berdasarkan hasil evaluasi diri madrasah (EDM) untuk mencapai standar nasional pendidikan (SNP) atau standar pelayanan minimal (SPM).

Adapun tujuan umum MTs Maslakul Huda Sluke pada tahun 2016/2017 – 2019/2020 dalam upaya mencapai delapan standar nasional pendidikan adalah :

- a) Menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan
- b) Hafal dan fasih bacaan salat dan keserasian /kesempurnaan gerakan
- c) Hafal dan fasih doa –doa harian, doa setelah sholat

²Dokumentasi Grand Design, MTs Maslakul Huda Sluke, Tahun Pelajaran 2016/2017, hlm.2.

- d) Terbiasa membaca Al Waqiah, asmaul husna, sholawat, juz `amma, yasin, tahlil dan istighosah
- e) Terbiasa menjalankan sholat dhuha
- f) Terbiasa memberikan infaq dan shodaqoh
- g) Mampu mengelola dan sekaligus sebagai petugas dalam kegiatan keagamaan di madrasah dan masyarakat
- h) Menerima kesepakatan meskipun berbeda dengan pendapatnya.
- i) Dapat menerima kekurangan orang lain
- j) Dapat memaafkan kesalahan orang lain
- k) Mampu dan mau bekerja sama dengan siapapun yang memiliki keberagaman latar belakang, pandangan dan keyakinan.
- l) Tidak memaksakan pendapat atau keyakinan diri pada orang lain
- m) Mencari jalan untuk mengatasi perbedaan pendapat/pikiran antara pribadi, dengan orang lain
- n) Mendorong orang lain untuk bekerjasama demi mencapai tujuan bersama.
- o) Datang tepat waktu
- p) Patuh pada tata tertib atau aturan bersama /madrasah
- q) Mengerjakan/mengumpulkan tugas sesuai dengan waktu yang ditentukan, mengikuti kaidah berbahasa tulis yang baik dan benar
- r) Berseragam sesuai peraturan madrasah dan melaksanakan piket sesuai jadwal
- s) Unggul dalam perolehan nilai ujian, persaingan untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan berikutnya,unggul dalam olimpiade sains dan kompetisi sains, kreatifitas seni, olahraga, dan IPTEK
- t) Unggul dalam lomba pidato 4 bahasa, Inggris, Arab, Indonesia dan Jawa

u) Unggul dalam kepemimpinan.³

2. Pengembangan Program Madrasah

a. Pengembangan Pendidikan Unggul

Pengembangan pendidikan unggul di MTs Maslakul Huda Sluke mempunyai beberapa program unggulan yang tidak dimiliki oleh madrasah/sekolah lain di Kab Rembang, yaitu program literasi/budaya membaca juz amma ketika pelajaran PAI (Aqidah akhlaq, Qur'an Hadits, Fiqih, SKI, Bahasa Arab, dan mulok keterampilan ibadah) setiap proses pembelajaran Mata pelajaran PAI siswa membaca juz amma 1 surah secara terus menerus sesuai jadwal yang ditetapkan madrasah. Program excellen berbasis Al qur'an, yang berisikan siswa dengan tingkat kecerdasan lebih, yang dipersiapkan khusus untuk even lomba dan diharapkan setelah lulus dari MTs ini siswa telah mampu menghafal al qur'an minimal 3 juz, program madrasah bisa, yang menyiapkan siswa untuk menghadapi kompetisi sains madrasah dan olimpiade sains nasional, program transportasi antar jemput gratis, yang ditujukan untuk mengatasi keterlambatan siswa, untuk memberikan solusi agar anak tidak putus sekolah karena jarak dengan madrasah sangat jauh dan meringankan beban biaya orangtua siswa, Program nasionalis madrasah, yang dilaksanakan melalui bimbingan guru dan karyawan, semua siswa MTs Maslakul Huda Sluke dapat diajak untuk berfikir bagaimana mengembangkan madrasah, terutama siswa yang tergabung dalam organisasi OSIS, dan Dewan galang Pramuka, dan program internet madrasah.⁴

b. Pengembangan Karakter Berbasis Budaya Kerja Kemenag

Integritas

Keselarasan antara hati, pikiran, perkataan dan perbuatan yang baik dan benar. Untuk mengimplemenasikan nilai budaya kerja “

³Dokumentasi Rencana Kerja Tahunan MTs Maslakul Huda Sluke Tahun 2016/2017, hlm.9-12.

⁴Observasi di MTs Maslakul Huda Sluke, tanggal 4 Desember 2016.

Integritas “ di MTs Maslakul Huda Sluke di dalam proses pembelajaran guru selalu berfikir positif dan bijaksana dalam melayani siswanya.

Profesionalitas

Bekerja secara disiplin, kompeten, dan tepat waktu dengan hasil terbaik. Untuk mengimplementasikan nilai “ profesionalitas “ di MTs Maslakul Huda Sluke disediakan finger print sebagai sarana untuk mendisiplinkan guru dan karyawan sehingga pelayanan siswa tepat waktu sesuai yang diharapkan.

Inovasi

Menyempurnakan yang sudah ada dan mengkreasi hal baru yang lebih baik. Dalam mengimplementasikan nilai ini, MTs Maslakul Huda bekerja sama dengan pusat layanan internet kecamatan /PLIK yang digunakan untuk pembelajaran TIK. Dan penyediaan sarana transportasi antar jemput gratis.

Tanggung Jawab

Bekerja secara tuntas dan konsekuen. Dalam mengimplementasikan nilai ini di MTs Maslakul Huda pada awal tahun pelajaran semua guru membuat rencana pembelajaran dengan tuntas dan konsekuen.

Keteladanan

Menjadi contoh yang baik bagi orang lain. Dalam mengimplementasikan nilai budaya keteladanan ini, di MTs Maslakul Huda Sluke semua pendidik dan tenaga kependidikan di dalam area madrasah tidak ada yang merokok hingga jam pulang sekolah bagi semua stakeholder, guru dan siswa mengenakan peci.

3. Statistik Siswa, Tenaga Pendidik dan Kependidikan MTs Maslakul Huda Sluke

a. Statistik Siswa 4 tahun terakhir

Tahun	Kelas VII	Kelas VIII	Kelas IX	Jumlah
2013/2014	161	165	148	474
2014/2015	159	140	156	455
2015/2016	145	168	161	474
2016/2017	160	152	163	475

Dengan rombongan belajar sebanyak 12 rombel untuk tiap-tiap tahun pelajaran.⁵

b. Tenaga Pendidik dan Kependidikan MTs Maslakul Huda Sluke

No	KETERANGAN	JUMLAH
Pendidik		
1	Guru PNS diperbantukan tetap	4
2	Guru Tetap Yayasan	24
3	Guru Honorer	-
4	Guru Tidak Tetap	-
Tenaga Kependidikan		
1	PNS	-
2	Pegawai Tetap Yayasan	-
3	Pegawai Honorer	-
4	Pegawai Tidak Tetap	4

Tenaga Kependidikan dalam hal ini adalah KA TU Madrasah, Bendahara, admin Madrasah, penjaga malam dan sopir. Tenaga kependidikan bertugas melaksanakan penyusunan administrasi, perlengkapan madrasah, penyusunan data statistik madrasah, penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan madrasah, ketata usahaan secara berkala.

⁵Dokumentasi Profil MTs Maslakul Huda Sluke Tahun Pelajaran 2016/2017.

B. Deskripsi Data Penelitian

1. Perencanaan/Planning Pembiayaan Pendidikan di MTs Maslakul Huda Sluke.

a. Pengertian Perencanaan Pembiayaan

Dari hasil wawancara dengan Abdul Jalil Amajid, mengatakan bahwa :

*“Perencanaan pembiayaan pendidikan adalah kegiatan penyusunan anggaran yang dilakukan untuk masa yang akan datang sebagai acuan untuk melaksanakan program pembiayaan pendidikan di MTs Maslakul Huda Sluke, perencanaan dimaksudkan agar pengeluaran sesuai rencana dan kegiatan dapat terlaksana dengan uang dan anggaran yang tidak jauh dari yang direncanakan”.*⁶

Senada dengan Abdul Jalil Amajid, Sumardi, menambahkan bahwa :

*“ Perencanaan pembiayaan pendidikan adalah proses kegiatan untuk menentukan tindakan/penyusunan pembiayaan di madrasah baik 4 tahunan maupun 1 tahunan agar tujuan dan sasaran madrasah dapat dicapai, perencanaan pembiayaan merupakan potret sehingga arahnya menjadi maksimal”.*⁷

Menurut tim perumus MTs maslakul Huda Sluke :

*“ Rencana biaya adalah kebutuhan dana yang diperlukan untuk pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dirumuskan biaya operasionalnya.”*⁸

Dari data dokumentasi dinyatakan bahwa :

“ Perencanaan pembiayaan dihitung tahunan untuk empat tahun ke depan, biaya program diperoleh dengan mengalikan jumlah satuan dengan harga satuan. Setelah biaya pertahun diperoleh, maka dengan mengalikan empat akan diperoleh total rencana biaya selama empat tahun mendatang. Anggaran ini untuk gaji, belanja barang habis pakai, langganan daya dan jasa, kerumahtanggaan, perjalanan dinas, pengembangan

⁶Abdul Jalil Amajid, Wawancara Pribadi, selaku waka Humas MTs Maslakul Huda Sluke, 6 Februari 2017.

⁷Sumardi , Wawancara Pribadi, selaku Kepala MTs, Maslakul Huda Sluke, 7 Februari 2017.

⁸Dokumentasi Grand Design MTs Maslakul Huda Sluke tahun Pelajaran 2016/2017, hlm .16.

*kompetensi lulusan, sistem penilaian, PTK, kurikulum, sarpras manajemen madrasah, dan pembinaan kesiswaan yang dirumuskan dengan merujuk peraturan pemerintah.*⁹

b. Metode dan Teori Perencanaan Pembiayaan Pendidikan

Dari hasil wawancara dengan Abdul Jalil Amajid mengatakan bahwa :

“ MTs Maslakul Huda Sluke dalam membuat perencanaan pembiayaan pendidikan dilakukan dengan mengalokasikan sumber-sumber pembiayaan yang memperhatikan produksi, proyek, program , dan aktifitas yang akan dibiayai (siklus kehidupan)”.¹⁰

Senada Dengan Abdul Jalil Amajid, Sumardi mengukuhkan bahwa :

“ MTs Maslakul Huda Sluke dalam menyusun perencanaan pembiayaan pendidikan, mengalokasikan sumber pembiayaan dengan memperhatikan , besarnya dana untuk membiayai program, proyek, dan aktifitas Kegiatan belajar mengajar dan apa yang akan dihasilkan nanti (metode siklus kehidupan)”.¹¹

Dalam wawancara ini Abdul Jalil Amajid menambahkan bahwa :

“ Dalam menyusun perencanaan pembiayaan di MTs Maslakul Huda Sluke, tim penyusun melakukan penyusunan perencanaan pembiayaan pendidikan sendiri dengan mendasarkan kebutuhan rumah tangga madrasah sendiri, dengan harapan agar dengan cepat dapat mewujudkan visi dan misi madrasah (teori radikal)”.¹²

c. Cara Merencanakan Pembiayaan Pendidikan dan Sumber Pembiayaan

Sebelum menyusun perencanaan pembiayaan (RAPBM), didahului dengan menyusun RKAM/RKAS, yang berisi rencana anggaran jangka pendek, menengah , dan panjang madrasah. Hal ini

⁹Dokumentasi Evaluasi Diri MTs Maslakul Huda Sluke tahun Pelajaran 2016/2017.

¹⁰Abdul Jalil Amajid, Wawancara Pribadi, selaku waka Humas MTs Maslakul Huda, Sluke, 6 Februari 2017

¹¹Sumardi, Wawancara Pribadi, selaku Kepala MTs Maslakul Huda Sluke, 7 Februari 2016.

¹²Abdul Jalil Amajid, Wawancara Pribadi, selaku waka Humas MTs Maslakul Huda, Sluke, 6 Februari 2017

senada dengan ungkapan Sumardi selaku kepala MTs Maslakul Huda Sluke bahwa :

*“Penyusunan rencana pembiayaan pendidikan didahului dengan menyusun rencana kerja anggaran madrasah (RKAM), yang merupakan arahan kegiatan empat tahunan, kemudian diperinci ke dalam rencana kerja tahunan (RKT) dengan menginventarisasi daftar kebutuhan, menganalisis kebutuhan, kemudian merumuskan kebutuhan tersebut”.*¹³

Hal di atas diperkuat oleh Ahmad Yulianto dan Badi atish Sholikhah, guru di MTs maslakul huda Sluke, sebagai berikut:

*“Penyusunan rencana pembiayaan pendidikan didahului dengan menyusun rencana kerja anggaran madrasah (RKAM), sesuai dengan program kerja tahunan yang akan dilaksanakan madrasah yang telah di plenokan bersama tim penyusun RAPBM yaitu Kepala Madrasah, , Waka Humas, Waka Kurikulum, Waka Sarpras, Waka Kesiswaan, Bendahara Madrasah, Ka Tu, Guru Senior,dan Komite Madrasah”.*¹⁴

Dari data dokumentasi di nyatakan bahwa :

*“ Untuk melaksanakan perencanaan program kegiatan madrasah, ada tiga langkah yang dilakukan, pertama membuat rencana biaya madrasah, kedua membuat rencana pendanaan madrasah, dan ketiga menyelaraskan rencana biaya dengan sumber pendanaan madrasah.”*¹⁵

Sebelum menghitung rencana biaya, Tim Perumus madrasah (TPM) perlu memiliki daftar biaya satuan, yang diterbitkan oleh pemerintah daerah setempat. Dengan daftar ini setiap biaya kegiatan dapat dihitung langsung dengan mengalikan jumlah satuan program dan kegiatan tersebut dalam daftar biaya satuan.

Penyusunan RAPBM, didahului dengan rapat tim panitia kecil yang terdiri dari Kepala Madrasah, Waka Humas, Waka Kurikulum, Waka Kesiswaan, Waka Sarpras dan Bendahara Madrasah yang

¹³Sumardi, Wawancara Pribadi selaku Kepala MTs Maslakul Huda Sluke, 7 Februari 2017.

¹⁴Ahmad Yulianto dan Badi atist Sholikhah, Wawancara Pribadi selaku guru MTs Maslakul Huda Sluke, 7 Februari 2017.

¹⁵Dokumentasi Grand Design MTs Maslakul Huda Sluke tahun 2016/2017, hlm.15.

dilaksanakan di MTs Maslakul Huda Sluke, pada bulan Juni sebelum tahun ajaran yang melibatkan Kepala Madrasah, Waka Kesiswaaan, waka kurikulum, waka Sarpras, waka humas, Bendahara Sekolah, Ka TU, guru senior, dan yayasan, untuk merumuskan skala kebutuhan madrasah yang tertuang dalam RKAM (rencana anggaran kerja madrasah) . RKAM dirumuskan oleh seluruh stakeholder madrasah yang bertanggung dalam program kegiatan kemudian dikumpulkan dalam kerangka penyamaan persepsi untuk menyusun program madrasah sesuai program 4 tahunan yang dijabarkan dalam program tahunan madrasah yang kemudian diplenokan bersama komite madrasah untuk dijadikan RAPBM.¹⁶

Perumusan rancangan anggaran biaya pendapatan dan belanja madrasah (RAPBM) merujuk pada peraturan pemerintah dan dikomunikasikan kepada komite madrasah dan pengampu kepentingan yang terkait.¹⁷

Setelah program dan kegiatan rutin/reguler dirumuskan, langkah selanjutnya adalah menghitung biaya pelaksanaan program dan kegiatan tersebut sehingga dapat diketahui dengan pasti berapa besar biaya program dan kegiatan rutin/reguler yang diperlukan, dan dari mana sumber pembiayaan dan kecukupannya untuk melaksanakan program selanjutnya langkah berikutnya adalah membuat rencana pembiayaan.¹⁸ Rencana pembiayaan dibuat untuk memperkirakan sumber dan jumlah dana yang diperkirakan didapatkan oleh madrasah. Beberapa sumber dana yang dapat diharapkan oleh madrasah antara lain, BOS, sumbagan masyarakat, APBD Kabupaten, Pendapatan asli madrasah, dan donatur . Langkah berikutnya adalah menyesuaikan rencana biaya dengan sumber pembiayaan.

Dalam wawancara dengan Sumardi, selaku Kepala MTs Maslakul Huda Sluke menyatakan bahwa :

¹⁶Observasi di MTs Maslakul Huda Sluke, 4 Juni 2016.

¹⁷Dokumentasi Evaluasi Diri MTs Maslakul Huda Sluke tahun 2016/2017.

¹⁸Dokumentasi Grand Design MTs Maslakul Huda Sluke tahun 2016/2017, hlm.23.

“Struktur perencanaan pembiayaan pendidikan di MTs Maslakul Huda Sluke dikelompokkan berdasarkan 8 Standar Nasional Pendidikan (SNP), dengan pembagian persentase masing-masing standar berdasarkan skala prioritas yang dipandang sangat urgen, seperti bidang kurikulum, (dolumen K13 untuk kelas VII dan VII, dokumen KTSP untuk kelas IX, perencanaan KBM selama 1 tahun, kegiatan work shop, pemberdayaan guru, bidang kesiswaan, kegiatan out dor dan indor, LDK, seni, olahraga, dan lomba-lomba”.¹⁹

Hal senada diperkuat pernyataan Abdul Jalil Amajid bahwa :

“ Perencanaan pembiayaan dengan mempresentase Standar Nasional pendidikan (SNP) dulu, dengan memenuhi 8 standart tersebut, meski kadang pelaksanaannya disesuaikan dengan kenyataan, kadang ada standar lain yang persentasenya dikurangi, jika ada standar lain yang membutuhkan”.²⁰

Pembagian persentase tersebut berdasarkan kesepakatan antara kepala madrasah, wakil kepala madrasah urusan kesiswaaan, kurikulum, humas, guru penanggungjawab kegiatan, yayasan, dan komite madrasah, petunjuk teknis penggunaan dana Bantuan operasional siswa, dan mengacu pada RAPBM tahun sebelumnya. Senada dengan pernyataan Sumardi, Ahmad Yulianto, Selaku waka Sarpras MTs Maslakul Huda Sluke, menyatakan bahwa :

“Perencanaan pembiayaan pendidikan sebagai dasar acuan dalam pelaksanaan kegiatan lembaga. Sebelum menyusun perencanaan pembiayaan diawali dengan menyusun RKAM, yang didahului dengan rapat inventarisasi program, yang dilakukan di MTs Maslakul Huda Sluke pada awal tahun pelajaran, yang melibatkan Kepala Madrasah, Bendahara madrasah, Guru, Yayasan, Komite madrasah dan siswa, untuk disusun menjadi RAPBM, dimana komponen RAPBM meliputi 8 standar nasional Pendidikan (SNP) yang terintegrasi satu sama lain., Sedangkan besar RAPBM yang direncanakan sebesar Rp. 475.000.000,00, dengan asumsi seluruh kegiatan tercover dengan pembiayaan yang direncanakan, dengan harapan terjadi peningkatan kualitas madrasah”.²¹

¹⁹Sumardi, Wawancara Pribadi ,Selaku Kepala MTs maslakul Huda Sluke, 7 Februari 2017.

²⁰Abdul Jalil Amajid, Wawancara Pribadi, selaku waka Humas MTs Maslakul Huda Sluke, 6 Februari 2017.

²¹Ahmad Yulianto, Wawancara Pribadi , selaku Waka Sarpras MTs Maslakul Huda Sluke, 8 Februari 2017.

Berbeda dengan Sumardi dan Achmad Yulianto, Abdul Jalil Amajid, mengatakan bahwa:

*“ Kadang ada biaya/ anggaran pembiayaan yang tidak tercover dalam APBM, seperti kegiatan pertemuan organisasi sosial keagamaan, dan perbaikan peralatan yang rusak maka sumber pembiayaannya dari donatur atau hutang dulu ”.*²²

d. Hasil Perencanaan Pembiayaan Pendidikan

Rencana kebutuhan pembiayaan pendidikan per komponen pendidikan di MTs Maslakul Huda Sluke pada tahun pelajaran 2016/2017 disusun dengan rincian sebagai berikut ²³ :

NO	BEBAN BIAYA	PERSENTASE
1	Standar Isi	2,21 %
2	Standar Proses	4,53 %
3	Standar Kompetensi Lulusan	3,07%
4	Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	0,84 %
5	Standar Sarana dan Prasarana	8,5%
6	Standar Pengelolaan	5,5%
7	Standar Pembiayaan	60,73 %
8	Standar Penilaian	14,62 %
	Total	100 %

Dari hasil dokumentasi dijabarkan :

“ Selanjutnya ditentukan berapa tarif biaya yang berlaku sehingga dapat diketahui alokasi biaya yang dibutuhkan untuk kedelapan standar tersebut, begitu pula dalam mendistribusikan dan mengalokasikan dana berdasarkan program atau kegiatan yang menjadi beban biaya lainnya dengan petunjuk teknis penggunaan dana BOS (bantuan operasional siswa) prosesnya mempunyai kesamaan dengan komponen-komponen yang lain ,

²²Abdul Jalil Amajid , wawancara Pribadi selaku waka Humas MTs maslakul Huda Sluke, 6 Februari 2017.

²³Diolah dari dokumen RAPBM tahun 2016/2016, dengan rumus , $\text{Beban (Biaya / Jumlah Total Pembiayaan) } \times 100\%$

kemudian dijabarkan berapa besar anggaran pembiayaan setiap komponen tersebut, yang dihitung dengan kecermatan berdasarkan rapat kesepakatan antar seluruh stakeholder madrasah yang di susun dari RKAM(rencana kerja anggaran madrasah) sebelumnya. Berdasarkan hitungan ini dapat diketahui berapa besaran operasional madrasah per tahun dalam menyelenggarakan proses pembelajaran (PBM). Dengan diketahuinya total biaya tersebut maka dapat ditentukan berapa unit cost untuk setiap siswa. Unit cost merupakan ukuran yang menggambarkan seberapa besar dana yang harus dialokasikan ke madrasah tersebut untuk kepentingan siswa dalam menempuh pendidikan.²⁴

e. Model Perencanaan Pembiayaan Pendidikan dan Pengesahan RAPBM

Untuk memudahkan dalam distribusi/penyebaran skala kebutuhan madrasah, diperlukan model perencanaan pembiayaan yang tepat, Sumardi Kepala MTs Maslakul Huda Sluke menegaskan bahwa :

*“ Dalam menyusun RAPBM di MTs Maslakul Huda Sluke mengacu pada juknis/petunjuk teknis Kemenag, dalam hal ini Madrasah menggunakan model costing,(pembiayaan berdasarkan keefektifan biaya) selanjutnya rancangan RAPBM ini di sahkan menjadi APBM oleh Kepala Madrasah, dan komite madrasah, mengetahui kasi Penma (pendidikan madrasah) Kemenag Kab Rembang “.*²⁵

Senada dengan Sumardi, Abdul Jalil Amajid, menambahkan bahwa :

*“ Penyusunan RAPBM menggunakan juknis dari Kemenag, model costing (pembiayaan)dan keefektifan biaya, dan RAPBM disahkan oleh Kepala Madrasah, komite madrasah, dan Kasi Penma Kemenag Kab Rembang”.*²⁶

Pemerincian detail dari Perencanaan pembiayaan pendidikan di MTs Maslakul Huda Sluke dapat dilihat dari dokumen RAPBM tahun

²⁴Observasi mendalam di MTs Maslakul Huda Sluke, Juni 2016.

²⁵Sumardi, wawancara Pribadi selaku Kepala MTs Maslakul Huda Sluke, 7 Februari 2017.

²⁶Abdul Jalil Amajid, Wawancara Pribadi, selaku waka Humas MTs Maslakul Huda, Sluke, 7 Februari 2017.

2016/2017, sebesar Rp 475.000.000,00, dokumen ini digunakan sebagai pedoman untuk menjalankan rangkaian kegiatan selama satu tahun pelajaran berjalan. RAPBM yang telah disepakati antara Kepala Madrasah, waka humas, waka Kesiswaan, waka Kurikulum, waka Sarana prasarana, Guru penanggungjawab kegiatan, Komite madrasah, dan Pengurus yayasan selanjutnya akan ditetapkan menjadi APBM (Anggaran Pendapatan Belanja Madrasah) oleh Kepala MTs Maslakul Huda Sluke dan Ketua Yayasan Maslakul Huda , mengetahui kasi Penma (Pendidikan Madrasah) Kemenag Kabupaten Rembang. APBM ini Sebagai dokumen, pembiayaan pendidikan di MTs Maslakul Huda Sluke merupakan produk yang direncanakan detail dan dikembangkan oleh penyelenggara pendidikan dan berlaku selama satu tahun pelajaran, selanjutnya disebut pembiayaan pendidikan.

2. Pengorganisasian / Organizing Pembiayaan Pendidikan di MTs Maslakul Huda Sluke

a. Pengertian Pengorganisasian

Dari hasil wawancara dengan Sumardi, Selaku Kepala MTs Maslakul mengatakan bahwa :

“Pengorganisasian adalah kegiatan untuk mengatur mobilisasi rencana program madrasah agar koordinasi antar warga madrasah dalam penyusunan pembiayaan pendidikan dapat berjalan efektif dan efisien”.²⁷

Senada dengan Sumardi, Abdul jalil Amajid, menambahkan bahwa :

“ Pengorganisasian merupakan proses membagi kerja ke dalam tugas-tugas yang lebih kecil, membebankan tugas-tugas itu kepada orang-orang yang sesuai dengan kemampuannya,

²⁷Sumardi, Wawancara Pribadi, selaku Kepala MTs Maslakul Huda Sluke,7 Februari 2017.

*dan mengalokasikan sumber daya, serta mengkoordinasikannya dalam rangka efektifitas pencapaian tujuan organisasi”.*²⁸

b. Proses Pengorganisasian

Dari hasil Observasi didapatkan bahwa Proses pengorganisasian pembiayaan pendidikan di MTs Maslakul Huda Sluke dilakukan dengan cara pemerincian pekerjaan, pembagian kerja, penyatuan pekerjaan, koordinasi pekerjaan dan monitoring. Pada tahap pertama proses pemerincian pekerjaan dilakukan dengan memerinci pekerjaan, yang terdiri dari 8 standar nasional pendidikan yaitu standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan dan standar penilaian, dengan menentukan tugas-tugas apa yang dilakukan Tim penyusun (RAPBM) untuk memerinci 8 standar tersebut, tahap kedua membagi seluruh beban kerja menjadi kegiatan-kegiatan yang dapat dilaksanakan oleh perorangan atau Tim penyusun, pembagian kerja ditentukan Kepala Madrasah dengan membagi 8 standar tersebut kepada Tim (Wakil-wakil kepala madrasah dan guru penanggungjawab kegiatan) dalam menjabarkan 8 komponen SNP tersebut, Waka sarpras membidangi standar sarana dan prasarana, yang terdiri dari kelengkapan dan pengembangan sarana prasarana madrasah, pemeliharaan gedung, dan pengadaan buku, Waka Kurikulum membidangi standar kompetensi lulusan, dan standar penilaian, yang terdiri dari pengembangan sistem penilaian, beban belajar, pengembangan kompetensi lulusan, dan kualifikasi kemampuan lulusan, Waka Humas membidangi standar pengelolaan, yang terdiri dari langganan daya dan jasa, belanja barang habis pake, dan pengembangan manajemen madrasah, penanaman karakter, pengelolaan administrasi madrasah, langganan daya dan jasa, dan

²⁸Abdul Jalil Amajid, Wawancara Pribadi, selaku Waka Humas MTs Maslakul Huda Sluke, 6 Februari 2017

hubungan dengan komite madrasah, Waka Kesiswaan membidangi standar proses, yang terdiri dari pembinaan kesiswaan, dan penentuan kriteria minimal proses pembelajaran, Ka Tu Madrasah membidangi standar pendidik dan tenaga kependidikan, yang terdiri dari pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan, work shop, dan perjalanan dinas, Bendahara madrasah membidangi standar pembiayaan yang terdiri dari biaya rutin honor guru dan karyawan, salah satu guru senior membidangi standar Isi yang terdiri dari pengembangan kurikulum dan akomodasi kerumahtanggaan, Ketiga yaitu menggabungkan pekerjaan para Tim penyusun program kegiatan dengan cara rasional dan efisien. Pengelompokan tugas yang saling berkaitan ini untuk memudahkan dalam alokasi pembiayaannya. Tahap keempat, menetapkan mekanisme kerja untuk mengkoordinasikan pekerjaan dalam satu kesatuan yang harmonis sehingga tujuan madrasah mudah dicapai dengan pembiayaan yang tersedia, bentuk pengkoordinasiannya dilakukan dengan rapat koordinasi, dimana semua tim memaparkan hasil pemerincian kebutuhan madrasah, kemudian plenokan dan disepakati bersama tim, untuk disusun menjadi dokumen APBM. Kelima, melakukan monitoring dan mengambil langkah-langkah penyesuaian untuk mempertahankan dan meningkatkan efektifitas, monitoring dilakukan dengan menilai rancangan yang akan ditetapkan, kemudian diadakan perbaikan atas kegiatan yang perlu penguatan atau diskualifikasi.²⁹

Mekanisme pengaturan pos pembiayaan pendidikan di MTs Maslakul Huda Sluke diawali dengan rapat koordinasi dengan seluruh stakeholder madrasah, kepala madrasah, waka-waka, guru penanggungjawab kegiatan, dan komite madrasah. Dengan pembentukan struktur kewenangan dan mekanisme koordinasi pembiayaan pendidikan yang dilakukan secara intens. Langkah pertama yang dilakukan sebelum mengorganisasikan kebutuhan

²⁹Dokumentasi, Pembiayaan Pendidikan di MTs Maslakul Huda Sluke tahun 2016/2017.

madrasah adalah Memprioritaskan skala kebutuhan madrasah yang paling urgen dan berdampak langsung pada siswa dalam KBM, seperti pemenuhan alat dan sarana KBM, gaji guru dan karyawan, lomba siswa, dan evaluasi.³⁰

Pemetaan kebutuhan ini dengan memperhatikan 8 standar nasional pendidikan yang merupakan arahan dalam menjalankan pembiayaan pendidikan terutama di standar pembiayaan sebagai panduannya.

Hal ini diperkuat oleh Sumardi selaku Kepala MTs Maslakul Huda Sluke pada saat wawancara yang menyatakan bahwa :

*“ Pengorganisasian Struktur pembiayaan madrasah dibuat berdasarkan program kerja madrasah, dan evaluasi diri madrasah (EDM), kemudian program madrasah dikelompokkan dengan melihat skala prioritas kebutuhan, waka-waka dan guru penanggungjawab kegiatan menyusun dalam bentuk RKAM empat tahunan, dan satu tahunan, dengan memilah-milah kebutuhan mana yang merupakan skala prioritas/efisien yang dipentingkan, pengorganisasian pembiayaan ini disusun berdasarkan buku acuan Kemenag, kemudian diplenokan untuk dijadikan draf RAPBM “.*³¹

Dari kutipan wawancara di atas terlihat adanya proses yang sangat terbuka dan akomodatif pada saat pengaturan/pengorganisasian pembiayaan pendidikan di madrasah tersebut sehingga semua kebutuhan madrasah dapat tercover dengan pembiayaan yang tersedia. Berikut potret realisasi pengorganisasian pembiayaan pendidikan di MTs Maslakul Huda Sluke tahun pelajaran 2016/2017.

a. Biaya Rutin

- 1) Honor guru tidak tetap (24 orang) = Rp. 248.000.000
- 2) Honor pegawai tidak (4 orang) = Rp. 44.400.000
- 3) Belanja barang habis pakai

³⁰Observasi di MTs, Maslakul Huda Sluke, pada tanggal 25 Agustus 2016.

³¹Sumardi, Wawancara Pribadi , selaku Kepala MTs Maslakul Huda Sluke, 7 Februari 2017.

- a) Alat tulis kantor = Rp. 7.000.000
- b) Alat kebersihan = Rp 1.000.000
- c) Alat listrik = Rp 500.000
- d) Foto copy = Rp 4.341.000
- e) Alat instalasi air sanitasi = Rp 500.000
- f) Pembelian buku = Rp 15.000.000
- 4) Langganan daya dan jasa
 - a) Belanja internet = Rp 5.400.000
 - b) Belanja langganan listrik = Rp 6.000.000
 - c) Langganan Koran = Rp 3.120.000
 - d) Biaya Pemeliharaan computer = Rp 2.500.000
- 5) Akomodasi kerumah tanggaan
 - a) Belanja peralatan rumah tangga = Rp 1.000.000
 - b) Belanja minum pegawai = Rp 2.500.000
- 6) Biaya perjalanan dinas
 - a) Biaya perjalanan dinas luar kota = Rp 1.000.000
 - b) Biaya perjalanan dinas dalam kota = Rp 500.000
- b. Biaya Kegiatan Reguler
 - 1) Pengembangan kompetensi lulusan
 - a) Melaksanakan bimbingan belajar mapel UN = Rp 3.500.000
 - b) Melaksanakan try out UN 4 kali = Rp 11.084.000
 - 2) Pengembangan kurikulum
 - a) Work shop awal tahun pelajaran = Rp 10.000.000
 - b) Penyusunan KTSP dan kurikulum 13 = Rp 500.000
 - 3) Pengembangan pembelajaran
 - 4) Pengembangan sistem penilaian
 - a) Ulangan tengah semester genap dan gasal = Rp 11.805.000
 - b) Ulangan semester genap kelas 9 = Rp 2.771.000
 - c) Ujian akhir semester gasal = Rp 8.075.000

- d) Melaksanakan ulangan kenaikan kelas 7 dan 8 = Rp 5.304.000
 - e) Melaksanakan ujian nasional = Rp 10.000.000
 - f) Melaksanakan unjian madrasah = Rp 10.000.000
 - g) Melaksanakan ujian praktek = Rp 1.500.000
 - h) Melaksanakan UAMBN = Rp 20.000.000
- 5) Pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan
- a) Mengikutkan guru MGMP = Rp 200.000
- 6) Pengembangan sarana dan prasarana Madrasah
- a) Pengadaan kipas angin untuk 10 ruang kelas = Rp 1.650.000
 - b) Membuat benner = Rp 1.000.000
 - c) Pengadaan etalase piala = Rp 2.500.000
 - d) Pengadaan buku olimpiade = Rp 4.520.000
 - e) Pemeliharaan mebeler kursi = Rp 300.000
 - f) Pemeliharaan mebeler meja = Rp 300.000
 - g) Perbaikan printer = Rp 1.500.000
 - h) Perawatan instalasi listrik = Rp 500.000
- 7) Pengembangan manajemen madrasah
- a) Rapat komite = Rp 3.000.000
 - b) Rapat dinas 12 x per tahun = Rp 1.800.000
 - c) Iuran KKM kota dan karesidenan = Rp 2.850.000
- 8) Pembinaan kesiswaan
- a) Pengiriman delegasi lomba KSM = Rp 2.500.000
 - b) Olimpiade sains = Rp 1.000.000
 - c) Aksioma = Rp 500.000
 - d) Gerak jalan = Rp 1.000.000
 - e) Kegiatan HUT RI = Rp 1.500.000
 - f) Menyelenggarakan PPDB = Rp 7.500.000
 - g) Menyelenggarakan MOPD = Rp 1.000.000
 - h) Perkemahan penerimaan

penggalang baru	= Rp. 3.500.000
i) Kemah muharrom	= Rp
3.000.000	
Jumlah	= Rp 475.000.000. ³²

Seluruh kegiatan tersebut di organisasikan berdasarkan perencanaan yang telah disusun dalam dokumen RAPBM, selanjutnya ditetapkan menjadi dokumen yang disebut APBM (anggaran pendapatan belanja Madrasah), yang disahkan Kepala Madrasah, Komite Madrasah, dan Kasi Penma (Pendidikan Madrasah) Kemenag Kab. Rembang.

4. Pelaksanaan/Aktuating Pembiayaan Pendidikan di MTs Maslakul Huda Sluke

a. Pengertian Aktuating/Pelaksanaan

Dari hasil wawancara dengan Sumardi mengatakan bahwa :

*“ Aktuating adalah kegiatan yang disusun ,direncanakan sesuai kebutuhan berdasarkan rencana anggaran madrasah untuk dilaksanakan guna memenuhi kebutuhan madrasah dalam kerangka manajemen pembiayaan di madrasah ”.*³³

Senada dengan Sumardi, Achmad Yulianto, selaku Waka sarpras menambahkan bahwa :

*“ Aktuating adalah proses pelaksanaan pembiayaan pendidikan berdasarkan rencana yang telah ditetapkan dalam APBM, guna memenuhi kebutuhan madrasah ”.*³⁴

b. Pelaksanaan Pembiayaan Pendidikan

Setelah perencanaan dan pengorganisasian pembiayaan pendidikan di MTs Maslakul Huda Sluke tersusun, selanjutnya tinggal

³²Dokumentasi Rencana Anggaran Pembiayaan Belanja Madrasah, MTs Maslakul Huda Sluke tahun pelajaran 2016/2017, hlm.99-101.

³³Sumardi,Wawancara Pribadi, selaku Kepala MTs Maslakul Huda Sluke, 7 Februari 2017.

³⁴Achmad Yulianto, Wawancara Pribadi Selaku waka Sarpras MTs Maslakul Huda Sluke, 7 Februari, 2017.

melaksanakan apa yang telah di rencanakan dan diorganisasikan dalam APBM.

Realisasi pembiayaan pendidikan dapat dilaksanakan mulai awal tahun pelajaran baru, pada awal bulan Juli, yaitu dengan membelanjakan pembiayaan baik barang maupun jasa, seperti pembayaran gaji guru, dan belanja barang keperluan pembelajaran. Sebelum melaksanakan kegiatan /aktuating dalam pembiayaan pendidikan maka di dahului langkah –langkah strategis, agar pelaksanaan berjalan maksimal dengan hasil optimal.³⁵

Dari hasil wawancara dengan Sumardi selaku Kepala Madrasah menyatakan bahwa :

“ Pelaksanaan pembiayaan pendidikan Mulai dilaksanakan pada awal bulan Juli, Kepala Madrasah memberikan Pelaksanaan pembiayaan pendidikan di MTs Maslakul Huda Sluke contoh pelaksanaan pembiayaan pendidikan, dengan pengarah, dan form yang bersumber dari buku administrasi madrasah yang diterbitkan kemenag, Kepala Madrasah memberikan motivasi kepada guru dan staf untuk bekerja melaksanakan pembiayaan pendidikan sesuai tugas dan tanggungjawabnya, dengan menkomunikasikan pelaksanaan pembiayaan dengan steak holder secara musyawarah mufakat setiap tri wulan dengan pembinaan sesuai petunjuk teknik ”³⁶.

Senada dengan hal di atas, Abdul Jalil Amajid,menambahkan bahwa :

“ Pembiayaan pendidikan di MTs Maslakul Huda Sluke mulai dilaksanakan sebelum tahun ajaran baru, dan saat tahun pelajaran berjalan, diantaranya perbaikan sarpras,pengadaan mebeler, Kepala Madrasah memberikan contoh pelaksanaan pembiayaan pendidikan dengan memberi penjelasan tentang apa yang akan dibelanjakan, kepala madrasah memberikan motivasi kepada guru dan staf untuk bekerja melaksanakan pembiayaan pendidikan sesuai tugas dan tanggungjawabnya masing-masing agar kegiatan berjalan tentunya harus dengan pembiayaan yang efisien, pelaksanaan pembiayaan ini di komunikasikan melalui komunikasi yang intens dan

³⁵Observasi lapangan, 25 Agustus 2016.

³⁶Sumardi, Wawancara Pribadi, selaku Kepala MTs Maslakul Huda Sluke. 7 Februari 2017.

*pemberitahuan kepada yayasan, sebelum melaksanakan tugas untuk melaksanakan pembiayaan pendidikan tentunya ada pengarahan dari kepala madrasah agar terhindar dari kesalahan”.*³⁷

c. Prosedur Pelaksanaan Pembiayaan Pendidikan

Proses dalam pelaksanaan pengucuran pembiayaan di MTs Maslakul Huda Sluke, berikut seperti yang di ungkapkan Sumardi, selaku Kepala Madrasah, bahwa :

*“ Prosedur pelaksanaan pembiayaan pendidikan pada setiap program kegiatan diawali dengan kepala urusan mengajukan anggaran dengan proposal kegiatan yang sesuai program kerja yang tercantum dalam APBM kepada kepala madrasah, kemudian kepala madrasah membaca, meneliti, kalau telah sesuai di acc, kepala madrasah memerintahkan Bendahara Madrasah untuk pencairan pembiayaan kegiatan, adanya orientasi sebelum melaksanakan pembiayaan pendidikan ini agar semua belanja masuk di sarpras(sarana dan prasarana) dan dikoding”.*³⁸

Senada dengan hal di atas Achmad Yulianto selaku Waka Sarpras, menegaskan bahwa :

*“ Prosedur pelaksanaan pembiayaan pendidikan pada setiap program kegiatan dilaksanakan sesuai juknis, kepala urusan mengajukan anggaran dengan proposal kegiatan yang sesuai program kerja yang tercantum dalam APBM kepada kepala madrasah, kemudian kepala madrasah membaca, meneliti, kalau telah sesuai di acc, kepala madrasah memerintahkan Bendahara Madrasah untuk pencairan pembiayaan kegiatan, adanya orientasi sebelum melaksanakan pembiayaan pendidikan ini agar semua belanja barang dapat diberi kode. Oleh Waka sarpras (sarana dan prasarana)”.*³⁹

Hal di atas diperkuat keterangan Kristia Ningsih, selaku Waka Kesiswaan yang menyatakan bahwa :

³⁷Abdul Jalil Amajid, Wawancara Pribadi, Selaku Waka Humas MTs Maslakul Huda Sluke, 6 Februari 2017.

³⁸Sumardi, Wawancara Pribadi , selaku Kepala MTs Maslakul Huda Sluke, 7 Februari 2017.

³⁹Achmad Yulianto, Wawancara Pribadi, selaku Waka Sarpras MTs Maslakul Huda Sluke, 7 Februari 2017.

*“ Prosedur pelaksanaan pembiayaan pendidikan pada setiap program kegiatan dilaksanakan , dimana pelaku kegiatan menyerahkan rencana anggaran kegiatan kepada Kamad, kemudian kamad mengintruksikan bendahara untuk mencairkan, adanya orientasi sebelum melaksanakan pembiayaan pendidikan ini agar semua belanja barang dapat diberi kodering dan di daftar sebagai aset madrasah ”.*⁴⁰

Prosedur pelaksanaan pembiayaan ini, dimaksudkan agar semua belanja barang dan jasa terdata dan teradministrasikan untuk dijadikan bahan laporan pertanggungjawaban bagi pengelola madrasah kepada pemerintah dan Yayasan.

d. Peningkatan Mutu Dengan Pembiayaan Pendidikan

Dengan pembiayaan pendidikan yang memadai dan mencukupi untuk terlaksananya kegiatan operasional madrasah, diharapkan akan mampu meningkatkan mutu dan kualitas madrasah, baik siswa maupun gurunya, hal ini senada dengan ungkapan Badi atist Shalihah, sebagai berikut :

*“ Dengan pembiayaan yang standar minimal dari BOS, berusaha untuk menghasilkan yang maksimal, sehingga mutu pendidikan dapat tercapai ”.*⁴¹

Senada dengan hal di atas, Sumardi selaku Kepala Madrasah menambahkan, bahwa :

*“ Dengan biaya operaional madrasah tersebut yang hanya mencukupi standar minimal yang berpijak pada efisiensi penggunaan dana BOS, MTs Maslakul Huda Sluke bisa menghasilkan hasil yang optimal meski anggaran minim, dan tidak ada iuran sama sekali, bahkan ada beasiswa untuk siswa miskin yang tidak tercover KIP ”.*⁴²

Senada dengan hal di atas Sugeng Indrayana, selaku guru MTs Maslakul Huda Sluke juga menjelaskan bahwa :

⁴⁰Kristia Ningsih, Wawancara Pribadi, selaku waka Kesiswaan MTs Maslakul Huda Sluke, 8 Februari 2017.

⁴¹Badi atist Shalihah, Wawancara Pribadi, selaku guru MTs Maslakul Huda Sluke, 8 Februari 2017.

⁴²Sumardi, Wawancara Pribadi, selaku Kepala MTs Maslakul Huda Sluke, 7 Februari 2017.

*“ Peningkatan mutu dan kualitas kerja dengan pembiayaan pendidikan yang tersedia dapat dilakukan dengan mengoptimalkan semua anggaran biaya yang sudah direncanakan ”.*⁴³

Berbeda dengan pendapat para stakeholder madrasah, Kristia Ningsih, mengemukakan bahwa :

*“ Untuk melaksanakan peningkatan mutu dan kualitas kerja dengan pembiayaan yang tersedia cukup dengan selalu menanamkan ruh keihlasan ”.*⁴⁴

e. Pemangku Kewenangan Melaksanakan Anggaran Pembiayaan

Dari hasil wawancara dengan Abdul Jalil Amajid, mengatakan bahwa :

*“ Wewenang untuk melaksanakan penggunaan anggaran pembiayaan pendidikan, ditasarrufkan oleh tim penanggungjawab kegiatan yang telah diorganisasikan, waka sarpras melaksanakan penggunaan biaya untuk belanja kebutuhan sarana dan prasarana madrasah, waka kurikulum melaksanakan penggunaan biaya untuk keperluan pembiayaan standar Isi, standar kompetensi lulusan, dan standar penilaian, Waka Humas melaksanakan penggunaan biaya untuk keperluan standar pengelolaan, waka kesiswaaan melaksanakan pembiayaan untuk keperluan standar proses, Ka Tu madrasah melaksanakan penggunaan biaya untuk keperluan standar pendidik dan tenaga kependidikan, bendahara madrasah melaksanakan penggunaan biaya untuk keperluan standar pembiayaan, dan salah satu guru senior melaksanakan penggunaan biaya untuk keperluan standar pengelolaan, kesemua penanggungjawab tersebut diberikan wewenang Kepala MTs Maslakul Huda Sluke untuk melaksanakan anggaran pembiayaan dalam satu masa tahun pelajaran 2016/2017 ”.*⁴⁵

Senada dengan Abdul Jalil Amajid, Hidayatul Aimmah menegaskan bahwa :

⁴³Sugeng Indrayana, Wawancara Pribadi, selaku guru MTs Maslakul Huda Sluke, 8 Februari 2017.

⁴⁴Kristia Ningsih, Wawancara Pribadi, selaku Waka Kesiswaaan MTs Maslakul Huda Sluke, 8 Februari 2017.

⁴⁵Abdul Jalil Amajid, Wawancara Pribadi, Selaku Waka Humas MTs Maslakul Huda, Sluke, 6 Februari 2016.

“ Yang berwenang melaksanakan anggaran pembiayaan pendidikan adalah Kepala Madrasah dengan mendelegasikannya kepada pejabat madrasah yang merupakan tim belanja, sesuai tugas pokoknya yang telah ditetapkan, seperti waka Humas bertanggungjawab melaksanakan pembiayaan standar sarpras, Waka Kurikulum standar Isi, penilaian, dan kompetensi lulusan, bendahara madrasah melaksanakan pembiayaan standar pembiayaan dan lain-lain”.⁴⁶

f. Pertanggungjawaban Pelaksanaan Pembiayaan Pendidikan

Dalam hal pertanggungjawaban penggunaan anggaran pembiayaan pendidikan, MTs Maslakul Huda Sluke, membuat laporan pertanggungjawaban pendapatan dan penggunaan keuangan kepada pemerintah dan pemangku kepentingan, yang dilakukan secara berkala dan rutin dan proses yang transparan.⁴⁷

Dokumentasi ini diperkuat oleh pernyataan Sumardi selaku Kepala Madrasah sebagai berikut :

“ Pertanggungjawaban pelaksanaan pembiayaan di MTs Maslakul Huda Sluke, disampaikan kepada Pemerintah melalui Kemenag Kab Rembang melalui kasi Penma(Pendidikan Masyarakat) , Inspektorat Jendral Kemenag pusat, Yayasan Kesejahteraan Maslakul Huda, komite madrasah ”.⁴⁸

Senada dengan pernyataan Sumardi Abdul Jalil Amajid, menegaskan bahwa :

“ Pertanggungjawaban pelaksanaan pembiayaan di MTs maslakul huda Sluke, disampaikan bendahara madrasah kepada Kepala Madrasah ,dan Yayasan, selanjutnya kepala madrasah melaporkan kepada kemenag lewat kasi penma (pendidikan madrasah) pada saat monitoring dan dilanjutkan kepada irjen pusat”.⁴⁹

⁴⁶Hidayatul Aimmah, Wawancara Pribadi, selaku Waka Kurikulum, 8Februari 2017.

⁴⁷Dokumentasi, Evaluasi Diri Madrasah, MTs Maslakul Huda Sluke ,Tahun pelajaran 2016/2017

⁴⁸Sumardi, Wawancara Pribadi, selaku Kepala MTs Maslakul Huda Sluke, 7 Februari 2017.

⁴⁹Abdul Jalil Amajid, Wawancara Pribadi, selaku Waka Humas, 6 Februari 2017.

g. Pembiayaan Tidak Terduga

Pada prakteknya untuk merealisasikan anggaran sesuai perencanaan yang telah ditetapkan terkadang masih ada pengeluaran yang tidak masuk dalam RAPBM, seperti pengeluaran operasional angkutan madrasah, perawatan alat-alat drum band, home visit, pemeliharaan gedung dan bangunan, dan kegiatan PBM lainnya, yang tidak membebankan pada siswa. Hal ini merupakan masalah yang perlu di carikan penyelesaiannya. Sumardi, Kepala MTs Maslakul Huda Sluke menjelaskan bahwa:

*“ Jika ada kebutuhan yang tidak tercantum dalam APBM, maka madrasah berupaya mencari sumber lain , diantaranya dari infaq guru yang diberlakukan secara leveling antara guru penerima tunjangan sertifikasi dan guru penerima tunjangan fungsional, dan infaq dari masyarakat/dunia industri “.*⁵⁰

Senada dengan Sumardi, Abdul Jalil Amajid, menambahkan bahwa :

*“ Kebutuhan yang tidak tercantum dalam APBM di carikan dari donatur”.*⁵¹

Kristia Ningsih, selaku Waka Kesiswaan memperjelas bahwa :

*“ Jika ada kebutuhan yang tidak tercantum dalam APBM maka pembiayaan didapat dengan swadaya penerima sertifikasi, tunjangan fungsional, dan donatur”.*⁵²

Adanya kekurangan dalam pembiayaan dengan pengeluaran yang tidak terduga dan wajib ditasarrufkan, akan menjadikan kedewasaan dan kewaspadaan dalam mendesain anggaran pembiayaan pendidikan di Madrasah ini.

⁵⁰Sumardi, Wawancara Pribadi selaku Kepala MTs, Maslakul Huda Sluke, 7 Februari 2017.

⁵¹Abdul Jalil Amajid, Wawancara Pribadi, selaku waka Humas MTs Maslakul Huda Sluke, 6 Februari 2017.

⁵²Kristia Ningsih, Wawancara Pribadi, selaku Waka Kesiswaan, MTs Maslakul Huda Sluke, 8 Februari 2017.

5. Pengawasan/controling Pembiayaan Pendidikan di MTs Maslakul Huda Sluke.

a. Pengertian Controlling

Dari hasil wawancara dengan Sumardi, selaku Kepala MTs Maslakul Huda Sluke menjelaskan bahwa :

*“ Pengawasan adalah kegiatan yang berfungsi untuk mengontrol semua proses pelaksanaan pembiayaan pendidikan yang sedang berlangsung di madrasah berdasarkan 8 standar nasional pendidikan guna mengetahui sejauh mana keberhasilannya ”.*⁵³

Senada dengan Sumardi, Abdul Jalil Amajid, menambahkan bahwa :

*“ Pengawasan pembiayaan pendidikan adalah proses , mengevaluasi, mengukur, menilai , dan membandingkan seberapa besar penerimaan dan pengeluaran pembiayaan pendidikan dapat dilaksanakan agar kelak dapat diadakan perbaikan ”.*⁵⁴

Hal ini diperkuat dengan dokumentasi dalam evaluasi diri MTs Maslakul Huda Sluke bahwa :

*“Pengawasan adalah proses pemeriksaan pembelanjaan keuangan madrasah dengan mencocokkan besarnya penerimaan dan pengeluaran, yang dilakukan secara periodik oleh petugas yang berwenang.”*⁵⁵

b. Mekanisme Pengawasan dan Ketersesuaian Pembiayaan Dengan Perencanaan

Untuk mengetahui jalannya aktifitas pembiayaan pendidikan diperlukan adanya controlling atau pengawasan sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai. Dalam aktifitas pembiayaan pendidikan kegiatan pengawasan disebut monitoring atau supervisi yang berguna untuk memberikan penilaian sementara terhadap

⁵³Sumardi , Wawancara Pribadi, selaku Kepala MTs, Maslakul Huda Sluke, 8 Februari 2017.

⁵⁴Abdul Jalil Amajid, Wawancara Pribadi, selaku Waka Humas MTs Maslakul Huda Sluke, 6 Februari 2017.

⁵⁵Dokumentasi Evaluasi diri MTs Maslakul Huda Sluke, tahun pelajaran 2016/2017.

pelaksanaan pembiayaan pendidikan sesuai yang direncanakan dan diorganisasikan agar terhindar dari kesalahan dalam penggunaan dana APBM (anggaran pendapatan belanja madrasah). Untuk mengetahui apakah budget/pembiayaan sesuai perencanaan dan pelaksanaannya sesuai program madrasah maka dapat dilihat dari hasil wawancara berikut :

Sumardi, Kepala MTs Maslakul Huda menyatakan bahwa :

*“Pembiayaan pendidikan di MTs Maslakul Huda Sluke diketahui berjalan lancar, anggaran yang telah dicairkan diperuntukkan sesuai perencanaan dan dibukukan setiap triwulan, dengan laporan per triwulan, sedangkan pengawasan ini sebagai tugas dalam memperbaiki kesalahan-kesalahan dan mengusahakan pencegahan agar tidak terulang kesalahan yang sama dalam melaksanakan pembelanjaan pembiayaan pendidikan, yang dilakukan dengan merencanakan anggaran dengan estimasi yang tepat berdasarkan tahun anggaran sebelumnya, untuk mengetahui penggunaan budget/anggaran yang telah ditetapkan dalam APBM sesuai perencanaan dapat diketahui dari realisasi kegiatan, yang tercatat di buku kas bendahara BOS, sedangkan pelaksanaan pembiayaan pendidikan di madrasah ini telah sesuai program madrasah , indikasinya adalah penggunaan dana melalui rencana kerja anggaran kemudian realisasi, berdasarkan APBM, dan untuk mengetahui pelaksanaan pembiayaan apakah telah sesuai dengan prosedur dan kebijakan yang telah ditentukan,dapat diketahui dengan mengikuti juknis BOS”.*⁵⁶

Pernyataan Sumardi juga diperkuat oleh Nita Ervinnaimah, Selaku KA TU dan Bendahara Madrasah,sebagai berikut :

“Jalannya pembiayaan pendidikan di MTs Maslakul Huda Sluke berjalan lancar, hal ini diketahui dengan mekanisme pencatatan dalam buku pengeluaran pembiayaan pendidikan dengan mekanisme kontrol dari kepala madrasah secara periodik tiap tiga bulanan, kadang-kadang juga terjadi kesalahan dalam mekanisme pengeluaran yang tidak terduga, maka untuk memperbaiki dan mencegah agar tidak terulang kesalahan yang sama pada pengeluaran pembiayaan, dapat dilakukan dengan mempelajari juknis BOS, dengan mencocokkan apakah penggunaan dana sesuai dengan perencanaan yang tertuang

⁵⁶Sumardi, Wawancara Pribadi , selaku Kepala MTs Maslakul Huda Sluke, 7 Februari 2017.

dalam APBM atau tidak, bila tidak maka perlu evaluasi agar tidak terjadi penyimpangan, dan semua pengeluaran disertai bukti yang sah/kuitansi, penggunaan budget/pembiayaan yang telah ditetapkan sesuai perencanaan, hal ini dapat diketahui dengan penyesuaian anggaran yang tersedia, Sedangkan untuk mengetahui pelaksanaan pembiayaan apakah telah sesuai program madrasah dapat diukur dengan kecocokan antara perencanaan dengan pelaksanaannya.”⁵⁷

Kristia Ningsih selaku Waka Kurikulum MTs Maslakul Huda Sluke, menambahkan, bahwa :

“Jalannya pembiayaan pendidikan di MTs Maslakul Huda Sluke berjalan sesuai koridor perencanaan yang tertuang dalam APBM, hal tersebut dapat dilihat dengan terlaksananya kegiatan MTs Maslakul Huda Sluke, sedangkan untuk memperbaiki kesalahan dan mengusahakan pencegahan agar tidak terulang kesalahan yang sama pada pembiayaan pendidikan, dapat dilakukan dengan mengevaluasi kekurangan program kegiatan sebelumnya. Dalam penggunaan budget/pembiayaan di madrasah ini telah sesuai dengan perencanaan yang ditetapkan, hal ini dapat dilihat dari saldo akhir tahun pada penggunaan dana, sementara itu pelaksanaan pembiayaan program madrasah dapat dilihat dari terlaksananya semua program kegiatan dengan SPJ pada setiap akhir kegiatan, Pelaksanaan pembiayaan pendidikan sesuai prosedur yang telah ditentukan, sesuai dengan terlaksananya semua program kegiatan madrasah”.⁵⁸

Prinsip keterbukaan dalam mengelola pembiayaan di MTs Maslakul Huda Sluke, sangat ditekankan oleh pengelola madrasah, hal ini agar semua proses pembiayaan dapat diketahui oleh seluruh stakeholder madrasah, agar kelak kesalahan atau kekurangan yang terjadi dapat dicegah bahkan dihindari.

c. Mengukur Keberhasilan Pembiayaan Pendidikan

Untuk mengukur sejauh mana keberhasilan pembiayaan pendidikan di MTs Maslakul Huda Sluke, dapat dilihat dari terealisasinya seluruh program kegiatan madrasah, dan prestasi siswa.

⁵⁷Nita Ervin Naimah, Wawancara Pribadi, selaku Ka Tu dan Bendahara MTs Maslakul Huda Sluke, 8 Februari 2017.

⁵⁸Kristia Ningsih, Wawancara Pribadi, selaku Waka Kesiswaan, MTs Maslakul Huda Sluke, 8 Februari 2017.

Hal ini senada dengan keterangan Sumardi, selaku Kepala MTs Maslakul Huda Sluke bahwa :

*“Keberhasilan pembiayaan pendidikan telah di indikatkan dalam grand design MTs Maslakul Huda Sluke,misalnya dengan pembiayaan di Waka kesiswaaan sekian rupiah maka Waka kesiswaaan harus mempunyai program kerja sesuai target,yang dibuktikan dengan hasil lomba yang ada dan seluruh biaya habis dalam satu tahun bahkan terkadang kurang, apabila terdapat kekurangan maka solusinya adalah diambilkan dari dana infaq guru yang dilakukan secara leveling ”.*⁵⁹

Senada dengan hal di atas, Abdul Jalil Amajid, Waka Humas MTs Maslakul Huda Sluke mengatakan bahwa:

*“ Untuk mengukur keberhasilan pembiayaan pendidikan di MTs Maslakul Huda Sluke,dapat dilihat jika penyerapan anggaran pembiayaan mencapai 100% dan tepat sasaran, keberhasilan ini distandarkan jika siswa terlayani dengan baik, mendapatkan kejuaraan pada even lomba-lomba, dan madrasah tidak mempunyai hutang dalam penyelenggaraan program dan seluruh biaya habis dalam satu tahun bahkan terkadang kurang, kekurangan ini dapat diatasi dengan dana dari donatur ”.*⁶⁰

Hal di atas juga diperkuat oleh Hidayatul Aimmah, selaku Waka Kurikulum MTs maslakul Huda, sebagai berikut :

*“ Keberhasilan pembiayaan pendidikan di MTs Maslakul Huda Sluke, dapat diketahui jika pembiayaan yang telah direncanakan dapat memenuhi kebutuhan madrasah dan seluruh biaya habis dalam satu tahun anggaran ”.*⁶¹

Indikator keberhasilan dalam membiayai program madrasah seperti yang telah di rencanakan dalam program tahunan , semua sepakat bahwa dengan terpenuhinya semua kebutuhan madrasah berarti pengelolaan pembiayaan dikatakan berhasil dan biaya habis dalam satu tahun anggaran.Hal ini senada dengan ungkapan Sugeng Indrayana, sebagai berikut :

⁵⁹Sumardi, Wawancara Pribadi, selaku Kepala MTs Maslakul Huda Sluke, 7 Februari 2017.

⁶⁰Abdul Jalil Amajid, Wawancara Pribadi, selaku Waka Humas MTs Maslakul Huda Sluke, 6 Februari 2017.

⁶¹Hidayatul Aimmah, wawancara Pribadi, selaku Waka Kurikulum MTs Maslakul Huda Sluke, 8 Februari 2017.

“ Mengukur keberhasilan pembiayaan pendidikan dengan melihat semua kebutuhan madrasah yang telah tercantum dalam perencanaan pembiayaan terpenuhi”⁶²

d. Bentuk Pengawasan

Pengawasan Tri wulan

Dari hasil wawancara dengan Sumardi, Kepala MTs Maslakul Huda Sluke menjelaskan bahwa :

“ Madrasah melalui Kepala Madrasah dan Ketua Yayasan mengadakan pengawasan interen atas pelaksanaan pembiayaan pendidikan secara berkala tiap tiga bulanan dengan memeriksa buku kas bendahara madrasah. Madrasah mempunyai prosedur pengawasan sebagai berikut, pertama pengecekan apakah pembelanjaan barang dan jasa sesuai APBM, kedua mengecek jumlah pengeluaran dan penerimaan tiap tri wulan, ketiga mengecek bukti fisik pembelanjaan yang berupa kuitansi dan arsip-arsip lainnya ”.⁶³

Pengawasan Tahunan

Senada dengan Sumardi, Abdul Jalil Amajid, menambahkan bahwa :

“, Pengawasan pelaksanaan APBM dilakukan setiap tahun sekali oleh Kemenag Kab Rembang dalam hal ini tim yang di bentuk kemenag di bawah koordinasi kasi penma (Pendidikan Masyarakat), dan Inspektorat Jendral (Irjen) pusat Kementerian Agama RI untuk melakukan pengawasan pelaksanaan pembiayaan pendidikan di MTs Maslakul Huda Sluke ”.⁶⁴

e. Hasil Pengawasan dan Pihak yang Melakukan Pengawasan

Pengawasan pembiayaan di tujukan agar semua proses kegiatan pembiayaan berjalan tanpa adanya penyimpangan, dan sebagai tindakan pencegahan kesalahan-kesalahan dalam pengelolaan pembiayaan pendidikan, sekaligus mengevaluasi pelaksanaan APBM, agar desain sebelumnya dapat digunakan untuk tahun pelajaran

⁶²Sugeng Indrayana, Wawancara Pribadi , selaku Guru MTs Maslakul Huda Sluke, 8 Februari 2017.

⁶³Sumardi, Wawancara Pribadi, Selaku Kepala MTs Maslakul Huda Sluke, 8 Februari 2017.

⁶⁴Abdul Jalil Amajid,Wawancara Pribadi, Selaku Waka Sarpras MTs Maslakul Huda, Sluke, 7 Februari 2017.

berikutnya , tentunya dengan perubahan dan penambahan program madrasah yang diperlukan sesuai kebutuhan.

Dari hasil pendokumentasian dinyatakan bahwa :

*“Hasil pengawasan pembiayaan pendidikan berimplikasi pada pengelolaan keuangan yang transparan, kredibel, dan akuntabel sehingga madrasah mengumumkan rencana pengelolaan keuangan kepada pemangku kepentingan, dan pengelolaan keuangan di MTs Maslakul Huda Sluke dapat diketahui dengan mudah oleh semua pemangku kepentingan madrasah.”*⁶⁵

Hal ini diperjelas dengan pernyataan Sumardi, bahwa :

*“ Model anggaran pendapatan belanja madrasah (APBM) tahun ini sangat mungkin digunakan lagi di tahun pelajaran berikutnya , jika masih relevan, dengan diperbaiki sesuai kebutuhan madrasah yang bersifat urgen, evaluasi/pengawasan pelaksanaan APBM dilakukan setiap tahun sekali oleh kepala madrasah, yayasan, dan Kemenag kasi penma Kab Rembang, pengawasan pelaksanaan pembiayaan pendidikan di MTs Maslakul Huda Sluke di lakukan oleh Tim kemenag Kab Rembang, Inspektorat Jendral (Irjen) Pusat Kementerian Agama RI”.*⁶⁶

Senada dengan hal di atas, Abdul Jalil Amajid , mengatakan bahwa :

*“ Model anggaran pendapatan belanja madrasah (APBM) tahun ini dapat digunakan untuk tahun-tahun berikutnya dengan modifikasi RAPBM, menyesuaikan kebutuhan siswa, dan urgenitas, Sedangkan evaluasi APBM, diadakan setiap tahun pelajaran berakhir, yang dilakukan oleh kepala madrasah dan Yayasan. Pengawasan pelaksanaan pembiayaan dilakukan oleh kepala madrasah, Yayasan, kasi Penma Kemenag Kab Rembang, dan Inspektorat Jendral Kemenag Pusat, Madrasah mempunyai instrumen dengan mekanisme pemeriksaan berkala setiap triwulan, dengan kontrol buku kas bendahara, memeriksa apakah pengeluaran sesuai perencanaan atau tidak, sedangkan prosedur pengawasan dimulai dari kepala madrasah, dan dilaporkan ke Yayasan, laporan SPJ Bos ke Kemenag Kab. Rembang dan diteruskan ke Irjen pusat”.*⁶⁷

⁶⁵Dokumentasi Evaluasi Diri MTs Maslakul Huda Sluke, tahun pelajaran 2016/2017.

⁶⁶Sumardi, Wawancara Pribadi ,Selaku Kepala MTs Maslakul Huda Sluke, 7 Februari 2017.

⁶⁷Abdul Jalil Amajid,wawancara Pribadi , selaku Waka Humas MTs Maslakul Huda Sluke, 6 Februari 2017.

Penjelasan waka Humas ini diperkuat Nita Ervinnaimah, KA TU sekaligus Bendahara Madrasah yang menyatakan bahwa:

*“ Model anggaran pendapatan belanja madrasah pada tahun ini akan digunakan pada tahun berikutnya dengan perbaikan dan penyempurnaan sesuai program madrasah dengan penambahan program-program baru yang direncanakan dan dapat dibiayai oleh anggaran madrasah, sedangkan mengenai evaluasi APBM, dilakukan setiap tahun sekali oleh kepala madrasah, guru, dan komite madrasah, Pengawasan pelaksanaan pembiayaan pendidikan dilakukan oleh tim pengawas kemenag Kab Rembang dan Irjen Kemenag, madrasah mempunyai instrumen pengawasan yang berupa instrumen Evaluasi diri madrasah (EDM) pada standar pembiayaan, pada dokumen EDM ini tergambar secara jelas bagaimana pengelolaan pembiayaan pendidikan di MTs Maslakul Huda Sluke, dan prosedur pengawasan yang dilakukan madrasah adalah, mulai mencocokkan buku kas pengeluaran dan pemasukan, mengecek bukti fisik pengeluaran, dan evaluasi, dan penyusunan SPJ Keuangan”.*⁶⁸

Melengkapi keterangan Nita Ervinnaimah, M .Mabruri Anwar, selaku komite madrasah mengatakan, bahwa :

*“ Model APBM tahun ini dapat digunakan untuk pedoman APBM tahun berikutnya tentunya dengan perbaikan dan penyempurnaan program, Sedangkan evaluasi APBM dilakukan setiap tahun pelajaran berakhir, yang dilakukan oleh Kepala Madrasah, Guru, komite madrasah, dan yayasan, pengawasan pelaksanaan pembiayaan pendidikan dilakukan oleh tim pengawas Kemenag Kab Rembang, dan Irjen Kemenag Pusat, Madrasah mempunyai instrumen pengawasan pembiayaan seperti yang tertuang dalam Evaluasi Diri Madrasah (EDM), madrasah mempunyai prosedur pengawasan, seperti pengecekan buku kas pengeluaran, bukti fisik pengeluaran, evaluasi program pembiayaan, dan laporan SPJ”.*⁶⁹

Adanya pengawasan ini untuk menjamin keterbukaan, bagi semua stakeholder pengelola madrasah baik Kepala madrasah, Guru, Komite madrasah, dan Pengurus Yayasan Kesejahteraan Maslakul Huda Sluke.

⁶⁸Nita Ervinnaimah, Wawancara Pribadi, selaku Ka Tu dan Bendahara MTs Maslakul Huda Sluke, 8 Februari 2017.

⁶⁹M. Mabruri Anwar, Wawancara Pribadi, selaku Komite Madrasah, 9 Februari 2017.

C. Analisis Data Penelitian

1. Analisis Data Perencanaan/ Planning Pembiayaan Pendidikan MTs di Maslakul Huda Sluke.

a. Pengertian Perencanaan

Pengertian perencanaan pembiayaan pendidikan yang disampaikan Sumardi , Abdul Jalil Amajid, dan Tim perumus perencanaan pembiayaan pendidikan MTs Maslakul Huda Sluke ,ada sisi kekurangan yang mendasar yaitu tidak dicantumkannya penegasan bahwa perencanaan akan dilaksanakan di masa mendatang, sebab sebagai apapun sebuah perencanaan belum dapat direalisasikan, dan belum dapat memotret keberhasilan sebuah program, oleh sebab itu Ali Mufron menegaskan bahwa perencanaan adalah proses mempersiapkan serangkaian keputusan untuk mengambil tindakan di masa yang akan datang yang di arahkan kepada tercapainya tujuan-tujuan dengan sarana yang optimal.⁷⁰ Senada dengan Ali Mufron, U. Saefullah memperkuat bahwa perencanaan adalah penentuan serangkaian tindakan untuk mencapai hasil yang diinginkan.⁷¹ Kedua pendapat teori ini baru pada tataran penentuan rangkaian tindakan, maka perlu realisasi rangkaian tindakan tersebut dirumuskan dalam sebuah konsep yang disesuaikan kebutuhan madrasah.

Dari data lapangan ,data teori dan pendapat dapat disimpulkan bahwa perencanaan pembiayaan pendidikan adalah proses mempersiapkan serangkaian keputusan untuk mengambil tindakan yang dijabarkan dalam konsep real yang akan dijadikan acuan dalam menjalankan roda kehidupan madrasah/sekolah dimasa mendatang untuk mencapai hasil yang diinginkan dengan pembiayaan yang terprogram sebagai haluan untuk mencapai tujuan.

⁷⁰Mufron, Ali, *Ilmu Pendidika Islam*, Aura Pustaka,Yogyakarta 2013, hlm.155.

⁷¹Saefullah , U,KH, *Manajemen Pendidikan Islam*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2009, hlm.22.

b. Metode dan Teori Perencanaan

Dari hasil wawancara dengan Abdul Jalil Amajid dan Sumardi tentang metode penyusunan perencanaan pembiayaan madrasah cenderung memilih metode analisis siklus kehidupan, yang hanya menekankan pada pengalokasian sumber pembiayaan, dan mempertimbangkan aspek rencana dan program saja, hal ini sesuai dengan teori yang mengatakan bahwa metode siklus kehidupan melihat berbagai kecenderungan dari berbagai aspek yang dapat dipertimbangkan untuk merumuskan rencana program.⁷² Terlihat bahwa metode ini tidak mempertimbangkan besaran sumber pembiayaan, dan tidak memperhatikan manfaat apa yang kelak akan diperoleh. Senada dengan data lapangan, data teori dan pendapat peneliti Nanang Fattah memperkuat bahwa metode analisis siklus kehidupan memperhatikan konsep, spesifikasi, pengujian, operasi, dan produksi.⁷³ Ini berarti semakin besar biaya produksi/pembiayaan, semakin banyak pula barang yang akan dihasilkan/semakin banyak program pembiayaan yang dapat dibiayai dan direalisasi.

Dari hasil wawancara kedua tokoh dapat dimengerti bahwa teori yang digunakan untuk menyusun perencanaan pembiayaan adalah teori radikal, artinya madrasah berhak dan bebas menyusun rencana anggaran pendidikan secara fleksibel, adil, bertanggungjawab, dinamis, praktis, dan dapat menambah keihlasan bagi penyusunnya, sebab semua gagasan yang dirancang dapat terakomodir, sesuai kebutuhannya guna mewujudkan visi madrasah, tanpa intervensi pihak lain, hal ini sesuai dengan prinsip-prinsip manajemen pendidikan Islam seperti yang dikemukakan Ali Mufron.⁷⁴ Senada dengan Ali Mufron, Husaini Usman, menjelaskan bahwa teori Radikal menekankan kebebasan lembaga untuk melakukan perencanaan

51. ⁷²Fattah Nanang, *Landasan Manajemen Pendidikan*, PT Remaja Rosda Karya, 2013, hlm.50-

⁷³Fattah, Nanang, Op.Cit, hlm. 53.

⁷⁴Mufron, Ali, Op.Cit, hlm. 145-150.

sendiri, dengan maksud agar lebih cepat memenuhi kebutuhan lokal.⁷⁵ Teori ini mengandung kelemahan, yaitu kebebasan menyusun anggaran pembiayaan akan membuka peluang kebocoran anggaran.

c. Cara Merencanaan Pembiayaan Pendidikan ,dan Sumber Pembiayaan

Dari hasil wawancara dengan Sumardi dijelaskan bahwa perencanaan pembiayaan pendidikan dimaksudkan agar pengeluaran sesuai rencana, dan kegiatan dapat terlaksana dengan uang dan anggaran yang tidak jauh dari yang direncanakan, sumber dana pembiayaan berasal dari BOS, Hal ini mengandung pengertian bahwa pengeluaran dalam membelanjakan anggaran pembiayaan pendidikan dilakukan dengan hati-hati dan sesuai rencana/planning yang telah ditetapkan antara Kepala madrasah dan komite madrasah agar tujuan yang hendak dicapai dalam perencanaan pembiayaan pendidikan dapat diwujudkan dengan segala daya dan upaya dengan sarana yang ada, yang berarti setiap madrasah/sekolah seharusnya menetapkan rencana-rencana yang menjadi prioritas pembiayaan pendidikan secara komprehensif. Hal ini sesuai dengan teori yang mengatakan bahwa perencanaan adalah suatu proses mempersiapkan serangkaian keputusan untuk mengambil tindakan di masa yang akan datang yang diarahkan kepada tercapainya tujuan-tujuan dengan sarana yang optimal.⁷⁶ Senada dengan teori ini Armida menguatkan bahwa dalam mengelola suatu pembiayaan pendidikan diperlukan suatu konsep dan sistem perencanaan yang matang, agar mampu merumuskan sistem pembiayaan nasional pendidikan Indonesia dalam kerangka otonomi daerah.⁷⁷ Dari data lapangan, pendapat peneliti, dan data teori dapat dipertegas bahwa perencanaan pembiayaan pendidikan dilakukan dengan memperhatikan skala prioritas dengan rencana yang telah

⁷⁵Usman, Husaini, *Manajemen Teori, Praktik, dan Riset Pendidikan*, Bumi Aksara, Jakarta, hlm,97

⁷⁶Mufron , Ali, Op.Cit, hlm.155.

⁷⁷Armida, *Model Pembiayaan Pendidikan di Indonesia*, Jurnal Media Akademika, Fakultas Adab IAIN Sulthan Thaha Saifuddin, Jambi, Vol.26, No.1, tahun, 2011.

ditetapkan sesuai konsep dengan sumber pembiayaannya berasal dari BOS, untuk mencapai tujuan yang telah digariskan guna perbaikan sistem di masa mendatang dengan sarana yang optimal.

Perencanaan pembiayaan pendidikan mengandung unsur-unsur sejumlah kegiatan yang ditetapkan sebelumnya, adanya proses, hasil yang ingin dicapai, dan menyangkut masa depan madrasah dalam waktu tertentu. Perencanaan pembiayaan bermanfaat sebagai :

- 1) Pemilihan berbagai alternatif terbaik
- 2) Penyusunan skala prioritas, baik sasaran maupun kegiatan
- 3) Menghemat pemanfaatan sumber daya organisasi
- 4) Alat meminimalkan pekerjaan yang tidak pasti, dan
- 5) Meningkatkan kinerja.⁷⁸

Kebutuhan pembiayaan dihitung tahunan untuk empat tahun ke depan. Menghitung biaya program diperoleh dengan mengalikan jumlah satuan dengan harga satuan. Setelah biaya pertahun diperoleh, maka dengan menjumlahkan semuanya akan diperoleh total rencana biaya yang dibutuhkan selama empat tahun mendatang. Anggaran pembiayaan madrasah dirumuskan merujuk peraturan pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota, RAPBM/RKAM pada MTs Maslakul Huda Sluke berisi: program kegiatan, sumber dana dan nominalnya, pembelanjaan dan nominalnya.⁷⁹ Hal ini sesuai dengan teori yang mengatakan bahwa pembiayaan sekolah adalah proses di mana pendapatan dan sumber daya tersedia digunakan untuk memformulasikan dan mengoperasionalkan sekolah di berbagai wilayah geografis dan tingkat pendidikan yang berbeda-beda.⁸⁰

⁷⁸Usman, Husaini, *Manajemen, Teori,Praktik, dan Riset Pendidikan*, PT Bumi Aksara, Yogyakarta, 2013, hlm.76.

⁷⁹Dokumentasi Evaluasi Diri MTs Maslakul huda Sluke tahun 2016/2017.

⁸⁰Akdon,et.al, *Manajemen Pembiayaan Pendidikan*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2015, hal.23.

Jadi penghitungan yang cermat yang merujuk pada peraturan pemerintah yang berlaku, dengan mengoptimalkan sumber daya yang tersedia, kemudian diformulasikan dan dioperasionalkan akan menghasilkan desain perencanaan pembiayaan yang ideal , yang berarti bahwa setiap kebijakan dalam pembiayaan akan mempengaruhi bagaimana sumber daya diperoleh dan dialokasikan.

Dari hasil pendokumentasian ,beberapa sumber dana yang dapat diharapkan oleh madrasah antara lain, BOS, sumbangan masyarakat, APBD Kabupaten, Pendapatan asli madrasah, dan donatur . Sumber pembiayaan madrasah dapat diperluas jangkauannya dengan melibatkan peran serta dunia Industri, yang belum dilakukan oleh madrasah, pelibatan peran serta dunia industri dapat melibatkan dunia industri dalam membangun karakter madrasah. Hal ini sesuai teori yang mengatakan bahwa pendidikan Islam adalah upaya mengembangkan, mendorong serta mengajak manusia untuk lebih maju dengan berlandaskan nilai-nilai tinggi dan kehidupan yang mulia, sehingga terbentuk pribadi yang lebih sempurna baik akal, perasaan maupun perbuatan.⁸¹ Jadi diversifikasi anggaran perlu dikembangkan dari berbagai sumber yang halal dan perolehannya dengan cara yang sah dan terpuji dengan tidak melawan hukum.

d. Hasil Perencanaan Pembiayaan Pendidikan

Merujuk dari pernyataan Sumardi bahwa Struktur perencanaan pembiayaan pendidikan di MTs Maslakul Huda Sluke dikelompokkan berdasarkan 8 Standar Nasional Pendidikan (SNP), dengan pembagian persentase masing- masing standar berdasarkan skala prioritas yang dipandang sangat urgen,seperti bidang kurikulum,(dolumen K13 untuk kelas VII dan VII, dokumen KTSP untuk kelas IX, perencanaan KBM selama 1 tahun, kegiatan work shop, pemberdayaan guru, bidang kesiswaan, kegiatan out dor dan indor, LDK, seni, olahraga,

⁸¹Mujib, Abdul, dan yusuf Mudzakir, *Ilmu Pendidikan Islam*, Kencana,Jakarta, 2008,hlm.26.

dan lomba-lomba . Penentuan program kegiatan tersebut agar didapatkan efisiensi dan efektifitas pembiayaannya. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Kisbiyanto yang mengatakan bahwa efisiensi anggaran terletak pada ketepatan analisis dan penggunaannya semaksimal mungkin bagi kepentingan pendidikan. Efektifitas anggaran terletak pada besarnya capaian tujuan pendidikan yang didukung oleh penggunaan anggaran pendidikan.⁸² Senada dengan Kisbiyanto. Senada dengan Kisbiyanto, Akdon mengukuhkan bahwa efisiensi biaya pendidikan ditentukan oleh ketepatan di dalam mendayagunakan anggaran pendidikan dengan memberikan prioritas pada faktor-faktor input pendidikan yang dapat memacu pencapaian prestasi belajar siswa.⁸³ Agar efektifitas dan efisiensi tersebut dapat dicapai maka diperlukan metode perencanaan pembiayaan pendidikan yang dapat mengakomodir seluruh kebutuhan siswa.

Dari dua fakta yang dikemukakan diatas tampak bahwa struktur perencanaan pembiayaan yang mengakomodasi seluruh kebutuhan akan berdampak pada efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran pembiayaan sehingga tujuan pendidikan yang diinginkan di MTs Maslakul Huda Sluke dapat dicapai.

Berbeda dengan Sumardi, dari dokumentasi pembagian persentase SNP, dengan komposisi tersebut, menunjukkan ketimpangan yang tajam antara 8 standar nasional pendidikan tersebut, hampir 60,73 % anggaran terfokus gaji tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, karena 24 dari 28 atau 85,7 % Tenaga pendidik dan kependidikan berstatus pegawai swasta. Ini berarti pengelola perlu memaksimalkan fungsi-fungsi manajemen melalui perencanaan yang efektif dan efisien, sehingga tidak ada pembiayaan di luar APBM.

⁸²Kisbiyanto, *Pengefektifan Manajemen Pembiayaan, Elementary*, Vol 2 No 1, 2014, hlm.160.

⁸³Akdon,et.al, Op.Cit, hlm 61.

2. Analisis Data Pengorganisasian/ Organizing Pembiayaan Pendidikan di MTs Maslakul Huda Sluke.

a. Pengertian Pengorganisasian

Dari data lapangan yang disampaikan Sumardi dan Abdul Jalil Amajid, tokoh kunci di MTs Maslakul Huda Sluke, dapat di konsepskan bahwa pengorganisasian pembiayaan pendidikan adalah kegiatan untuk mengatur mobilisasi rencana program madrasah yang dapat di biyai dengan anggaran yang tersedia dengan membagi kerja dalam tugas-tugas kecil kepada orang-orang yang mempunyai kemampuan di bidangnya untuk mengalokasikan sumber daya dan mengkoordinasikannya agar efektif untuk mencapai tujuan organisasi. Hal ini sesuai dengan teori yang di kemukakan Terry dalam Ali Mufron, bahwa pengorganisasian dilakukan untuk menghimpun dan menyusun semua sumber yang disyaratkan dalam rencana, terutama sumber daya manusia, sehingga kegiatan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.⁸⁴ Pendapat teori ini berorientasi pada proses penghimpunan dan penyusunan sumber daya, tidak memperhatikan ketersediaan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki oleh organisasi (dalam hal ini madrasah). Berdasarkan data penelitian, data teori dan pendapat peneliti, pengorganisasian dalam pembiayaan pendidikan perlu memperhatikan ketersediaan sumber daya dan memanfaatkan segala sesuatu yang telah ada sebagai bahan pertimbangan untuk mengorganisasikan program yang nantinya akan dijalankan agar tidak terjadi keruwetan, dan dapat dijangkau oleh pelaksana program dalam hal ini adalah stakeholder madrasah.

b. Proses Pengorganisasian

Dari data lapangan yang disampaikan Sumardi menyatakan pengorganisasian struktur pembiayaan madrasah dibuat berdasarkan program kerja madrasah, dan evaluasi diri madrasah (EDM),

⁸⁴Mufron, Ali, Op Cit, hlm 159.

kemudian program madrasah dikelompokkan dengan melihat skala prioritas kebutuhan program yang di kemukakan waka-waka, dan guru penanggungjawab kegiatan menyusun dalam bentuk RKAM, empat tahunan, dan satu tahunan, dengan memilah-milah kebutuhan mana yang merupakan skala prioritas yang dipentingkan, pengorganisasian ini disusun berdasarkan buku acuan Kemenag, kemudian diplenokan untuk dijadikan draf RAPBM. Hal ini sesuai dengan teori yang mengatakan bahwa pengorganisasian dilakukan untuk menghimpun dan menyusun semua sumber yang diisyaratkan dalam rencana, terutama sumber daya manusia, sedemikian rupa sehingga kegiatan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.⁸⁵ Proses pengorganisasian hampir serupa dengan perencanaan berbeda dalam hal pengkoordinasian program dan pembagian kerja, pengkoordinasian dan perencanaan dalam perumusannya memprioritaskan kebutuhan program. Dari data lapangan dan data teori dan pendapat peneliti dapat dipertegas bahwa dalam setiap kegiatan pengorganisasian pembiayaan terkandung tiga unsur yaitu, kerjasama, prioritas kebutuhan, dan tujuan yang hendak dicapai.

Data lapangan yang disampaikan Sumardi ini diperkuat dengan data dokumentasi, pada proses pengorganisasian pembiayaan pendidikan di MTs Maslakul Huda Sluke dilakukan dengan cara pemerincian pekerjaan, pembagian kerja, penyatuan pekerjaan, koordinasi pekerjaan dan monitoring dan reorganisasi. Pada tahap pertama proses pemerincian pekerjaan dilakukan dengan memerinci pekerjaan dengan menentukan tugas-tugas apa yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai dalam pembiayaan pendidikan di MTs Maslakul Huda Sluke, tahap kedua membagi seluruh beban kerja menjadi kegiatan-kegiatan yang dapat dilaksanakan oleh perorangan atau kelompok. Di sini perlu diperhatikan bahwa orang-orang yang

⁸⁵Ibid, hlm.159.

akan disertai tugas untuk menyusun pembiayaan pendidikan di madrasah ini harus didasarkan pada kualifikasi, tidak dibebani terlalu berat dan juga tidak terlalu ringan agar pengorganisasian atau tata kelola mampu dilaksanakan oleh madrasah sebagai lembaga yang berwenang. Tahap ketiga yaitu menggabungkan pekerjaan para penanggungjawab program kegiatan dengan cara rasional dan efisien. Pengelompokan tugas yang saling berkaitan ini untuk memudahkan dalam alokasi pembiayaannya. Tahap keempat, menetapkan mekanisme kerja untuk mengkoordinasikan pekerjaan dalam satu kesatuan yang harmonis sehingga tujuan madrasah mudah dicapai dengan pembiayaan yang tersedia. Kelima, melakukan monitoring dan mengambil langkah-langkah penyesuaian untuk mempertahankan dan meningkatkan efektifitas, karena pengorganisasian dalam pembiayaan pendidikan di MTs Maslakul Huda Sluke merupakan suatu proses yang berkelanjutan, maka diperlukan penilaian ulang terhadap kelima langkah sebelumnya secara terprogram untuk menjamin konsistensi, efektif, dan efisien dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan pendidikan. Menurut pendapat peneliti tim perlu memperhatikan skala kebutuhan prioritas, jangan sampai kebutuhan ini tidak terorganisasikan dalam RAPBM, sehingga tidak dapat dibiayai, maka diperlukan koordinasi dan pemilahan kebutuhan yang tepat. Hal ini sesuai dengan teori yang mengatakan bahwa mengorganisasikan adalah suatu proses menghubungkan orang-orang yang terlibat dalam organisasi tertentu dan menyatu padukan tugas serta fungsinya dalam organisasi.⁸⁶ Penempatan orang-orang yang yang berkompeten dibidangnya akan membantu mengefektifkan program pembiayaan yang pantas dijalankan dan memberikan manfaat yang optimal bagi siswa sebagai subjek pendidikan. Hal ini sesuai dengan prinsip-prinsip umum manajemen yang di kemukakan Henri Fayol yaitu asas

⁸⁶Seafullah, U, KH, *Manajemen Pendidikan Islam*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2012, hlm.2.

pembagian kerja, asas wewenang dan tanggungjawab, asas disiplin, asas kesatuan perintah, asas kesatuan arah, asas kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, asas pemusatan wewenang, asas, hierarki, asas keteraturan, asas keadilan, dan asas inisiatif.⁸⁷ Pendapat teori ini baru sebatas menghubungkan dan menyatukan tugas/fungsi organisasi yang dibebankan pada orang yang diberi tanggungjawab untuk menatanya, seharusnya perlu melibatkan pakar/tim ahli dalam proses pengorganisasian kebutuhan madrasah, misalnya dari kasi pendidikan masyarakat, atau pengawas madrasah, sehingga hasil pengorganisasian pembiayaan pendidikan yang disusun benar-benar real dan dapat dilaksanakan. Dari data lapangan, data teori, dan pendapat peneliti dapat di simpulkan bahwa penentuan skala prioritas dalam pengorganisasian pembiayaan pendidikan di pandang mampu memberikan solusi bagi semua kepentingan pembiayaan dengan memperhatikan besaran anggaran yang tersedia di Madrasah ini.

3. Analisis Data Pelaksanaan/ Aktuating Pembiayaan Pendidikan di MTs Maslakul Huda Sluke.

a. Pengertian Aktuating/Pelaksanaan

Dari konsep yang di paparkan Sumardi dan Achmad Yulianto, dapat di jelaskan pengertian Aktuating menurut MTs Maslakul Huda adalah kegiatan melaksanakan pembiayaan pendidikan yang telah disusun dan direncanakan sesuai kebutuhan dengan memberikan tanggungjawab pada individu atau kelompok untuk merealisasikannya sesuai rambu-rambu dan petunjuk teknis yang telah digariskan oleh pemerintah dan madrasah guna memenuhi kebutuhan madrasah. Hal ini sesuai dengan teori yang mengatakan bahwa aktuating adalah kegiatan yang menggerakkan dan mengusahakan agar para pekerja/pelaksana melakukan tugas dan kewajibannya.⁸⁸ Untuk dapat

⁸⁷Ibid, hlm. 11.

⁸⁸Saefullah, U, KH. Op.Cit , hlm.42.

melaksanakan tugas, pelaksanaana harus mampu memahami tugasnya, dapat berkomunikasi dengan baik, mengetahui harga barang, dan jujur, berangkat dari hal ini peaksanaan program akan memotret sejauh mana perencanaan pembiayaan pendidikan di MTs Maslakul Huda Sluke menuai keberhasilan. Senada dengan hal tersebut, Ali Mufron mengemukakan aktuating adalah suatu usaha yang dilakukan oleh pimpinan untuk memberikan penjelasan, petunjuk serta bimbingan kepada orang-orang yang menjadi bawahannya sebelum dan selama melaksanakan tugas.⁸⁹ Tidak harus pimpinan yang selalu memberikan penjelasan, dan petunjuk teknis, bisa dari sumber lain yang dapat dipercaya, pimpinan dapat bertindak sebagai fasilitator pelaksanaan kegiatan dan controlling, pimimpinan tidak sebatas memberikan pengarahan dan bimbingan teknis, maka sebaiknya pimpinan juga terjun langsung ikut mendampingi jalannya pelaksanaan pembiayaan pendidikan, dalam hal ini pimpinan sebagai tauladan yang diikuti seharusnya sesekali terjun langsung dilapangan sebagai uswatun khasanah. Dari data lapangan ,data teori, dan pendapat peneliti dapat di kukuhkan bahwa aktuating merupakan proses implementasi anggaran pendidikan yang melibatkan pelaksana untuk bertindak tepat sesuai perencanaan yang telah dirumuskan, dengan mekanisme kordinasi dan petunjuk teknis yang berlaku.

b. Pelaksanaan Pembiayaan Pendidikan

Pendapat Sumardi dan Abdul Jalil Amajid, dalam wawancara, terkesan protokoler dan kaku, semua program pembiayaan yang akan dilaksanakan menurutnya harus sesuai dengan form Kemenag, hal ini dapat berdampak pada situasi psikologis pada pelaksanaan anggaran, bisa jadi anggaran kurang terserap secara maksimal, semua yang akan dilaksanakan dikomunikasikan dengan kepala Madrasah sehingga akan timbul (*ewuh pakewuh*) dalam bahasa Jawa. Meski demikian komunikasi dipandang penting agar tidak terjadi miskonsepsi antara

⁸⁹Mufron, Ali, Op.Cit, hlm.159.

pelaksana anggaran dan Kepala Madrasah, hal ini sesuai dengan teori yang dikemukakan Ali Mufron bahwa pelaksanaan /aktuating dalam pembiayaan pendidikan adalah suatu usaha yang dilakukan oleh pimpinan untuk memberikan penjelasan, petunjuk, serta bimbingan kepada orang-orang yang menjadi bawahannya sebelum dan selama melaksanakan tugas.⁹⁰ Senada dengan Ali Mufron, AT.Sugito menegaskan, sesuai fungsinya Kepala Madrasah sebagai manajer menggerakkan, menggambarkan, dan mempengaruhi para bawahannya bagaimana orang lain melaksanakan tugas yang esensial dengan menciptakan suasana yang menyenangkan untuk bekerjasama.⁹¹ Pendapat kedua teori ini hanya sebatas penekanan fungsi manajemen control, sehingga perlu bagi pimpinan untuk melihat potret madrasah/sekolah lain bagaimana mereka mentasarrufkan pembiayaan pendidikan.

Dari data lapangan, data teori, dan pendapat peneliti, dapat diperjelas bawa betapa pentingnya orientasi dan menggerakkan para pelaksana sebelum mentasarrufkan anggaran pembiayaan pendidikan agar apa yang akan dilaksanakan sesuai dengan perencanaan dan pelaksanaannya fleksibel, tidak sekaku form kemenag, sehingga kesalahan bisa dihindari, yang kesemuanya akan bermuara pada amar ma'ruf nahi munkar demi tercapainya visi madrasah yaitu terwujudnya peserta didik yang religius , peduli, dan meraih prestasi.

c. Prosedur Pelaksanaan Pembiayaan Pendidikan

Dari persepsi, Sumardi, Achmad Yulianto, dan Kristia Ningsih, terdapat gambaran yang jelas bahwa prosedur pelaksanaan pembiayaan pendidikan diawali dengan pengajuan proposal kegiatan, dari pelaksana anggaran,dengan kejelian dan ketelitian Kepala Madrasah, meng acc proposal kegiatan untuk ditindak lanjuti dengan memerintahkan bendahara madrasah untuk mencairkan anggaran agar

⁹⁰Mufron, Ali, Op.Cit, hlm. 159.

⁹¹Soegito,H.A.T, *Pergeseran Paradigmatik Manajemen Pendidikan*,Widya Karya, Semarang, 2013, hlm.33-34.

program kegiatan madrasah dapat segera dilaksanakan. Apabila kegiatan berupa belanja barang maka semua hasil pembelanjaan harus terdokumentasikan dengan nota pembelian agar dapat di SPJ kan, semua barang akan diberikan kodering oleh Waka sarpras dan dicatat sebagai inventaris madrasah, dan bila pelaksanaan anggaran berupa jasa seperti gaji guru, dan karyawan maka akan di SPJ kan sesuai mekanisme yang berlaku. Hal ini sesuai dengan teori yang mengatakan bahwa manajemen Pendidikan Islam adalah suatu proses penataan /pengelolaan lembaga pendidikan islam yang melibatkan sumber daya manusia muslim dan menggerakkannya untuk mencapai tujuan pendidikan Islam secara efektif dan efisien.⁹²Penguatan fungsi manajemen pendidikan Islam ini diharapkan mampu menggerakkan *mindset* pelaksananya. Dari data lapangan, data teori dan pendapat peneliti di tegaskan bahwa prosedur pelaksanaan manajemen pembiayaan pendidikan di MTs Maslakul Huda Sluke dilakukan melalui mekanisme dengan mengedepankan kehati-hatian dan pemaksimalan prinsip pengarah/aktuating, semua yang dibelanjakan tercatat dan di SPJ kan.

d. Peningkatan Mutu

Dari pendapat Badi atish Shalihah, Sumardi, Sugeng indrayana, dan Kristia Ningsih, dapat di simpulkan bahwa untuk Peningkatkan mutu dan kualitas kerja madrasah dapat dilakukan dengan mengoptimalkan anggaran yang tersedia dengan menanamkan ruh keihlasan. Realita di Madrasah Sungguh luar biasa Para siswa khususnya di kelas Excellen, mampu menghafal minimal 3 Juz Al Qur`an, sedangkan pada kelas reguler, miniman siswa lulus dari MTs Maslakul Huda Sluke telah hafal Juz `amma, dan baru-baru ini, Kepala Madrasah terpih sebagai Kepala Madrasah berprestasi tingkat Propinsi Jawa Tengah, dan pada bulan Januari lalu, siswa di MTs ini terpilih mewakili Kab Rembang untuk mengikuti olimpiade

⁹²Uhbiyati, Nur, *Ilmu Pendidikan Islam*, Pustaka Setia, Bandung, 1998, hlm.19.

Matematika Nasional yang diselenggarakan UNISMA.(Universitas Islam Malang), ini adalah buah keihlasan yang ditanamkan oleh madrasah sejak awal,hal ini sesuai teori prinsip manajemen yaitu ikhlas.⁹³ Keihlasan yang tertanam pada semua stakeholder madrasah akan menjiwai setiap langkah, dengan keihlasan dan ketulusan akan melahirkan jiwa yang bersih dan bertanggungjawab. Dari data lapangan, data teori, dan pendapat peneliti, dapat di simpulkan bahwa peningkatan mutu dapat dilakukan dengan pengoptimalan anggaran dan pengukuhan sikap keihlasan pada semua pihak yang berkepentingan.

e. Pemangku Kewenangan Melaksanakan Anggaran Pembiayaan

Dari data lapangan yang di kemukakan Abdul Jalil Amajid dan Hidayatul Aimmah, menjelaskan, bahwa wewenang untuk melaksanakan penggunaan anggaran pembiayaan pendidikan, ditasarrufkan oleh tim penanggungjawab kegiatan yang telah diorganisasikan, waka sarpras melaksanakan penggunaan biaya untuk belanja kebutuhan sarana dan prasarana madrasah, waka kurikulum melaksanakan penggunaan biaya untuk keperluan pembiayaan standar Isi, standar kompetensi lulusan, dan standar penilaian, Waka Humas melaksanakan penggunaan biaya untuk keperluan standar pengelolaan, waka kesiswaaan melaksanakan pembiayaan untuk keperluan standar proses, Ka Tu madrasah melaksanaka penggunaan biaya untuk keperluan standar pendidik dan tenaga kependidikan,bendahara madrasah melaksanakan penggunaan biaya untuk keperluan standar pembiayaan, dan salah satu guru senior melaksanakan penggunaan biaya untuk keperluan standar pengelolaan, kesemua penanggungjawab tersebut diberikan wewenang Kepala MTs Maslakul Huda Sluke untuk melaksanakan anggaran pembiayaan dalam satu masa tahun pelajaran 2016/2017. Hal ini sesuai dengan prinsip manajemen yang dikemukakan Henry Fayol

⁹³Mufron, Ali, Op.Cit, hlm. 145.

dalam U.Saefullah yang mengatakan bahwa dalam manajemen terdapat prinsip-prinsip yang harus dijalankan agar pengelolaan aktifitas manajerial dapat berjalan sukses, prinsip-prinsip tersebut adalah asas pembagian kerja dan asas pembagian wewenang dan tanggungjawab. Kewenangan dalam pelaksanaan anggaran perlu dibagi agar tidak memberatkan, dan tidak terjadi penyalagunaan dan arogansi kekuasaan.

Dari data lapangan data teori, dan pendapat peneliti dapat ditegaskan bahwa pembagian wewenang dan tanggungjawab untuk menghindari penyalagunaan dan arogansi kekuasaan.

f. Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran

Dari dokumen evaluasi diri madrasah, yang diperkuat dengan wawancara dengan Sumardi, dan Abdul Jalil Amajid, tampak jelas bahwa mekanisme pertanggungjawaban penggunaan anggaran dalam pelaksanaan pembiayaan pendidikan di MTs Maslakul Huda Sluke, dikategorikan dalam dua pertanggungjawaban, internal dan eksternal. Pertanggungjawaban internal disampaikan dari pelaksana anggaran kepada Kepala Madrasah dan Yayasan Kesejahteraan Maslakul Huda Sluke yang menaungi MTs Maslakul Huda Sluke, dan pertanggungjawaban eksternal, yang disampaikan Kepala Madrasah kepada Kemenag Kab Rembang melalui Kasi Pendidikan Madrasah (Penma), dan Inspektorat Jendral Kemenag Pusat. Hal ini sesuai teori prinsip-prinsip Manajemen Pendidikan Islam, yaitu tanggungjawab.⁹⁴ Pertanggungjawaban merupakan hal pokok supaya kelak dapat dipercaya lagi. Tanpa pertanggungjawaban yang jelas akan menimbulkan penyimpangan, dan penyimpangan merupakan amalan *syaiton* yang mutlaq ditinggalkan.

Dari pendapat teori data lapangan, dan pendapat peneliti, perlu penambahan bahwa pertanggungjawaban perlu disampaikan pada guru dan karyawan MTs Maslakul Huda, agar prinsip keterbukaan

⁹⁴Mufron, Ali, Op.Cit, hlm.148.

dapat di tegakkan, tren ini belum dijumpai di sekolah/madrasah di Kab Rembang.

g. Pembiayaan Tidak Terduga

Dari data Wawancara dengan Sumardi dan Kristia Ningsih, tampak bahwa pembiayaan tidak terduga terkadang muncul di tengah pelaksanaan penggunaan anggaran, anggaran tidak terduga adalah anggaran yang tidak tercantuk dalam APBM, tetapi merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi , misalnya biaya rapat komite, madrasah, dan Bea Siswa siswa miskin yang tidak tercover dalam KIP, dan uang saku pengawas, untuk mengatasinya madrasah mencari sumber lain yang halal, diantaranya dari infaq guru, pendapatan asli madrasah dari hasil persewaan Bus dan Truk Madrasah, dan donatur dunia industri. Hal ini sesuai teori prinsip-prinsip manajemen pendidikan Islam yaitu fleksibel.⁹⁵ Pengambilan keputusan yang tepat, dan langkah fleksibel dapat diterapkan dengan mengedepankan prinsip kebermanfaatan anggaran pembiayaan.

Dari data lapangan data teori , dan pendapat peneliti dapat di tajamkan bahwa pembiayaan yang tidak tercantum dalam perencanaan pembiayaan dapat disikapi dengan prinsip fleksibilitas dan kebermanfaatan anggaran, oleh karenanya diperlukan ketegasan untuk memasukkan anggaran dari luar pemerintah (BOS) kedalam sistem APBM MTs Maslakul Huda Sluke.

4. Analisis Data Pengawasan/Controlling Pembiayaan Pendidikan MTs Maslakul Huda Sluke.

a. Pengertian Pengawasan/Controlling

Dari data lapangan yang dikemukakan Sumardi dan Abdul Jalil Amajid, dan dokumen evaluasi diri madrasah, diperoleh pengertian konsep bahwa controlling adalah proses pemeriksaan penggunaan anggaran pembiayaan pendidikan dengan mencocokkan, mengukur,

⁹⁵Ibid., hlm 150.

menilai, membandingkan, besarnya pengeluaran dan penerimaan, yang dilakukan secara periodik oleh yang berwenang, agar program yang telah dilaksanakan dapat diketahui keberhasilannya dan kelak dapat diperbaiki. Hal ini sesuai dengan teori yang mengatakan pengawasan adalah proses pemantauan yang terus menerus untuk menjamin terlaksananya perencanaan secara konsekuen, baik materiil, maupun spiritual untuk meluruskan sesuatu yang tidak lurus, mengoreksi yang salah, dan memberikan yang hak.⁹⁶Teori ini mengandung sisi kekurangan dalam hal waktu pengawasan, pengawasan cukup dilakukan secara berkala, tidak per hari, supaya dapat memberikan pelaksana untuk bekerja dengan nyaman. Dari sisi temuan data lapangan, dipertegas peneliti bahwa dalam pemeriksaan penggunaan anggaran, Kepala Madrasah harus mampu mengontrol pelaksanaannya, mencocokkan pengeluaran dan pendapatan, mempersentasekan berapa persen anggaran terserap dan yang belum. Dalam mengefektifkan fungsi pengawasan kepala madrasah dapat bertindak sebagai evaluator program hingga dapat memantau seberapa besar tingkat keberhasilannya.

Dari temuan data lapangan, data teori, dan pendapat peneliti mengindikasikan bahwa controlling atau pengawasan bukan sekedar pemeriksaan kegiatan, tetapi lebih pada proses kehati-hatian dalam menjalankan suatu program pembiayaan disekolah, terlepas dari sikap suka atau tidak suka pengawasan mutlaq diperlukan untuk menghindari kesalahan, korupsi, dan tindakan melawan hukum,

b. Mekanisme Pengawasan dan Keteresuaian Pembiayaan Dengan Perencanaan

Dari data lapangan yang dikemukakan Sumardi, Kristia Ningsih dan Nita Ervinnaimah menyatakan bahwa pembiayaan pendidikan di MTs Maslakul Huda Sluke diketahui berjalan lancar, anggaran diperuntukkan sesuai perencanaan dibukukan dalam buku kas setiap

⁹⁶ Saefullah, U, KH, Op.Cit, hlm.38.

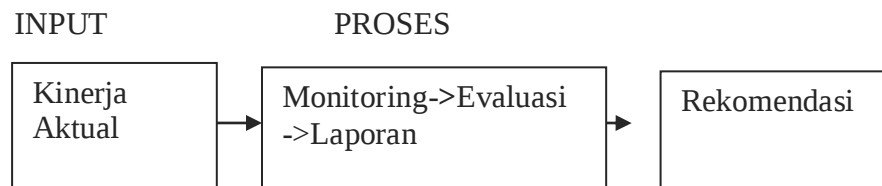
triwulan, dengan laporan per triwulan, mengikuti juknis BOS dengan mencocokkan penerimaan dengan pengeluaran. Pembukuan disetiap pelaksanaan akan mempermudah SPJ, tanpa melakukan penundaan, dari kumpulan SPJ-SPJ kegiatan dihimpun per triwulan untuk di laporkan kepada pemangku kepentingan, Hal ini sesuai dengan teori yang mengatakan bahwa Pengawasan adalah aktivitas menilai, baik catatan (record) dan menentukan prosedur-prosedur dalam mengimplementasikan anggaran, apakah sesuai dengan peraturan, kebijakan, dan standar-standar yang berlaku.⁹⁷ Senada dengan hal di atas Nanang Fattah memperjelas bahwa pada dasarnya proses pengawasan terdiri dari tiga tahap, pertama menetapkan standar pelaksanaan, pengukuran pelaksanaan pekerjaan dibandingkan dengan standar, dan menentukan kesenjangan (deviasi) antara pelaksanaan dengan standar dan rencana.⁹⁸ Dari data penelitian, data teori, dan pendapat peneliti tampak bahwa pengawasan/ controlling berfungsi untuk memonitoring seluruh aktifitas penggunaan anggaran pembiayaan pendidikan, untuk mencegah terjadinya kesalahan, dan mencegah penyimpangan. Pengawasan meliputi penentuan standar, supervisi/monitoring, dan mengukur pelaksanaan/aktuating terhadap standar dan memberikan keyakinan bahwa tujuan organisasi tercapai . Hal senada dikatakan oleh Soegito, H.A.T, bahwa pengawasan sangat erat kaitannya dengan perencanaan, karena melalui pengawasan efektifitas manajemen dapat diukur.⁹⁹ Dari pendapat ini dapat di skemakan mekanisme kegiatan controlling pembiayaan pendidikan di MTs Maslakul Huda Sluke.

Gambaran Skematik kegiatan Controlling/Pengawasan dapat dilukiskan sebagai berikut :

⁹⁷Fattah ,Nanang, *Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan*, PT Remaja RosdaKarya, Bandung, 2000.hlm .65.

⁹⁸Fattah, Nanang, *Landasan Manajemen Pendidikan*, PT Remaja RosdaKarya, Bandung, 2013.hlm.101.

⁹⁹Soegito, H.A.T, Op.Cit, hlm. 34.



Gambar 5 . Skema Pengawasan

c. Mengukur Keberhasilan Pembiayaan Pendidikan

Dari data penelitian di dapatkan bahwa untuk untuk mengukur keberhasilan pembiayaan pendidikan di MTs Maslakul Huda Sluke,dapat dilihat jika penyerapan anggaran pembiayaan mencapai 100% , program tepat sasaran, siswa terlayani dengan baik, mendapatkan kejuaraan pada even lomba-lomba,pembiayaan dapat memenuhi kebutuhan madrasah .Keberhasilan ini juga dapat dilihat jika madrasah tidak mempunyai hutang dalam penyelenggaraan program. Hal ini diperkuat dengan penelitian Buhari Luneto yang mengatakan bahwa hal terpenting pada penyusunan RAPBS/M adalah bagaimana memanfaatkan dana secara efisien serta mengalokasikan dana secara tepat sesuai kebutuhan agar keberhasilan program dapat di capai.¹⁰⁰ Mengalokasikan dana dengan tepat dan efisien merupakan indikasi kebermanfaatan pembiayaan.

Dari data penelitian data teori, dan pendapat peneliti terlihat bahwa ketiganya hanya memandang keberhasilan hanya dari sisi program jasmaniah, belum merambah rohaniyyah, oleh karenanya MTs Maslakul Huda perlu menetapkan standar keberhasilan dengan faktor tersebut. Jadi keberhasilan dalam pengelolaan pembiayaan pendidikan dapat dilihat dari efisiensi dan besarnya penyerapan anggaran yang disertai bukti keberhasilan siswa dalam akademik dan non akademik.

¹⁰⁰Luneto, Buhari,*Manajemen Pembiayaan Pendidikan*, di Madrasah, Jurnal Tadbir, IAIN Sultan Amai Gorontalo, Vol 3 No. 2 ,tahun .2015.

d. Bentuk Pengawasan

Dari data penelitian dapat dijelaskan bahwa sistem pengawasan /controlling pembiayaan pendidikan dilakukan secara periodik, pengawasan Tri wulan dan pengawasan tahunan. Bila diperlukan pengawasan dapat di sikluskan mingguan, agar mempermudah pengorganisasian dalam SPJ nya. Hal ini sesuai dengan teori yang mengatakan bahwa dalam proses pengawasan terdapat beberapa unsur yang perlu mendapat perhatian yaitu ukuran dan standarisasi dari pengawasan.¹⁰¹

Dari data lapangan, data teori dan pendapat peneliti dapat di pertegas bahwa pengawasan dalam pembiayaan pendidikan bukan hanya pengawasan tri wulan dan pengawasan tahunan, tetapi pengawasan dapat dilakukan setiap minggu pada saat brifing atau rapat koordinasi, ini mengindikasikan agar pengelolaan dan pengawasan pembiayaan pendidikan berlangsung transparan dan penuh keberkahan dengan melibatkan banyak stakeholder madrasah, sesuai prinsip teori humanisme, yang memanusiakan manusia , melibatkan teman sejawat dalam kegiatan kepengawasan internal.

e. Hasil Pengawasan dan Pihak Yang Melakukan Pengawasan

Dari data penelitian, wawancara dan observasi, dapat diperjelas bahwa hasil pengawasan pembiayaan pendidikan berimplikasi pada pengelolaan keuangan yang transparan, kredibel, dan akuntabel, madrasah mengumumkan rencana pengelolaan keuangan kepada pemangku kepentingan, hasil pengawasan berupa rekomendasi bahwa pengelolaan keuangan di MTs maslakul Huda wajar tanpa pengecualian. Sedangkan pihak yang melakukan pengawasan dibagi menjadi dua, pertama pengawasan internal, yang dilakukan kepala sekolah terhadap bendahara madrasah, dan para pelaksana anggaran pembiayaan dalam hal ini adalah Wakil-wakil kepala Madrasah di

¹⁰¹Fattah, Nanang, *Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan*, PT Remaja Rosda Karya, Bandung, 2000, hlm. 67.

tambah guru senior dan bendahara madrasah dengan menyampaikan SPJ di akhir kegiatan. Kedua pengawasan external yang dilakukan oleh Kemenag Kab Rembang dan Inspektorat Jendral (Irjen) Kemenag pusat terhadap MTs Masl;akul Huda Sluke. Hal ini sesuai dengan teori yang mengatakan bahwa fungsi pengawasan meliputi penentuan standar, supervisi, dan mengukur pelaksanaan terhadap standard dan memberikan keyakinan bahwa tujuan organisasi.¹⁰² Adanya pengawasan ini untuk menjamin keterbukaan, bagi semua steakholder pengelola madrasah baik Kepala madrasah, Guru, Komite madrasah, dan Pengurus Yayasan Kesejahteraan Maslakul Huda Sluke. Dari data lapangan , data teori dan pendapat peneliti dapat di simpulkan bahwa betapapun baiknya hasil/rekomendasi dari produk pengawasan harus dianggap sebagai momentum untuk perbaikan program dimasa mendatang

D. Temuan Penelitian

No	Realitas	Temuan
1	Perencanaan dilakukan dengan menyusun rencana jangka pendek, menengah,dan panjang, yang didahului menyusun RKAM,dengan menginventarisir, menganalisis,dan merumuskan daftar kebutuhan, oleh tim perencana.Selanjutnya tim bekerja membuat: rencana anggaran biaya,rencana pendanaan,dan menyelaraskan rencana biaya	Perencanaan yang ideal dilakukan dengan menetapkan rencana yang menjadi prioritas, mengacu Peraturan pemerintah, perhitungannya cermat,mengoptimalkan sumber daya dan diformulasikan dengan jelas agar kelak tidak muncul pembiayaan tidak terduga . Pendistribusiannya mengakomodir kebutuhan siswa,

¹⁰²Soegito,H.A.T, *Pergeseran Paradigmatik Manajemen Pendidikan*,Widya Karya, semarang, 2008, hlm. 34.

	dengan pendanaan, kemudian dihitung beban biaya tersebut dengan merujuk PP. Agar RAPBM disusun dengan metode costing(pembiayaan) berdasar keefektifan biaya.	dan memaksimalkan fungsi manajemen perencanaan.
2	Pengorganisasian dilakukan dengan memerinci pekerjaan, pembagian kerja, penyatuan pekerjaan, koordinasi pekerjaan dan monitoring. Pemerincian pekerjaan dilakukan dengan memerinci pekerjaan, yang terdiri dari 8 standar nasional pendidikan yaitu menentukan tugas-tugas apa yang dilakukan Tim penyusun (RAPBM) untuk memerinci 8 standar tersebut , kedua membagi seluruh beban kerja menjadi kegiatan-kegiatan yang dapat dilaksanakan oleh perorangan atau Tim penyusun, dengan membagi 8 standar tersebut kepada Tim (Waka-Waka madrasah, Bendahara/Ka TU dan guru penanggungjawab kegiatan) dalam menjabarkan 8 komponen SNP tersebut, Waka sarpras membidangi standar sarana dan prasarana, Waka Kurikulum membidangi, standar kompetensi	Pengorganisasian yang ideal menurut peneliti Ada pembagian tugas yang jelas sesuai keahlian tim agar tidak tumpang tindih, memprioritaskan kebutuhan, ada kerjasama tim, dan mengetahui tujuan pengorganisasian yang hendak dicapai

lulusan, dan standar penilaian. Waka Humas membidangi standar pengelolaan, Waka Kesiswaan membidangi standar proses, dan , Ka Tu Madrasah membidangi standar pendidik dan tenaga kependidikan, Bendahara madrasah membidangi standar pembiayaan, salah satu guru senior membidangi standar Isi. ketiga menggabungkan pekerjaan para Tim penyusun program dengan rasional dan efisien untuk memudahkan dalam alokasi pembiayaannya. Keempat , menetapkan mekanisme kerja untuk mengkoordinasikan pekerjaan dalam satu kesatuan harmonis sehingga tujuan madrasah mudah dicapai dengan pembiayaan yang tersedia, bentuk pengkoordinasiannya dilakukan dengan rapat koordinasi, dimana semua tim memaparkan hasil pemerincian kebutuhan madrasah, kemudian plenokan dan disepakati bersama tim, untuk disusun menjadi dokumen APBM. Kelima, melakukan monitoring dan mengambil langkah-langkah penyesuaian untuk	
--	--

	mempertahankan dan meningkatkan efektifitas	
3	Pelaksanaan/aktuating di mulai mengacu perencanaan dan pengorganisasian, pada awal bulan Juli, pelaksana/tim mengajukan proposal kegiatan ke Kamad, setelah diteliti, ada kesesuaian dengan perencanaan, disetujui, bendahara mencairkan anggaran dengan rekomendasi Kamad untuk membelanjakan barang maupun jasa, seperti pembayaran gaji guru, dan belanja barang keperluan pembelajaran. Pelaksananya adalah tim belanja barang dan jasa, melalui koordinasi Kepala Madrasah dan Waka sarpras agar belanja barang dapat dikodering sebagai inventarisasi barang. Sebelum melaksanakan kegiatan aktuating di dahului langkah strategis, agar pelaksanaan berjalan maksimal dengan hasil optimal	Aktuactualisasi pembiayaan pendidikan yang ideal menurut peneliti pengoptimalan besaran anggaran pembiayaan, hingga mencapai 100 % , mengacu perencanaan yang ada, terjaganya mutu madrasah dan tertanamnya rasa keihlasan pada tim belanja barang/jasa (waka-waka, Bendahara/Ka.TU), mengedepankan prinsip kehati-hatian dan pengoptimalan anggaran yang tersedia .Setiap pelaksanaan kegiatan disertai pelaporan dalam bentuk SPJ kegiatan.
4	Controlling dilakukan secara periodik tiap tri wulan dan tahunan , semua pengeluaran dan penerimaan di catat dalam buku kas.oleh Kasi Pendidikan	Controlling yang ideal menurut peneliti apabila hasil pengawasan yang telah dilakukan dapat dinilai, dibandingkan, dan dievaluasi,

madrasah dan Irjen Kemenag Pusat (pengawasan extern), dan pengawasan intern dari Kepala Madrasah dan yayasan kepada para tim pelaksana program kegiatan.	untuk direkomendasikan guna perbaikan proses di masa mendatang. Conrolling yang ideal apabila produknya dapat diaplikasikan untuk meningkatkan penyerapan anggaran dan mutu madrasah. Controlling yang ideal adalah pengawasan vertikal dan horisontal, yang kelak akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Swt.
---	--

